

# INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKIP) SEMESTER 1 TAHUN 2022



## KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Allah SWT laporan Kinerja Instansi pemerintahan (LKIP) semester 1 tahun 2022 Inspektorat Daerah kabupaten sumedang telah dapat diselesaikan sebagai kewajiban yang merupakan acuan bagi seluruh entitas di lingkungan Inspektorat sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian program dan kegiatan selama tahun 2022 pada semester 1 yang diukur berdasarkan indikator Kinerja Utama(IKU) dalam perubahan renstra khususnya pada tahun anggaran 2022.

Pada tahun 2022 Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang menetapkan 5(lima) indikator Kinerja Utama(IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan baik secara kuantitatif maupun kualitatif untuk menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran strategis yang ditetapkan.

Ke 5 (lima ) indikator kinerja utama (IKU) tersebut meliputi :

- a. Maturitas SPIP
- b. Presentase pemenuhan Infrastruktur peningkatan kapabilitas APIP
- c. Presentase perangkat daerah yang melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.
- d. Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan rekomendasi.
- e. Persentase Penurunan temuan penyimpangan terhadap APBD.

Capaian IKU tersebut secara umum mengidentifikasi adanya perubahan yang cukup positif dalam kinerja inspektorat yang dicapai pada tahun ke tiga pelaksanaan renstra inspektorat 2018 – 2023 . namun disadari bahwa kinerja masih belum optimal dan memerlukan kerja keras untuk mewujudkan perbaikan yang diharapkan. Demikian pula halnya upaya reformasi birokrasi yang dilakukan inspektorat.

Oleh karena itu untuk tahun 2022, inspektorat kabupaten Daerah sumedang terus berupaya secara berkesinambungan menjalankan peran sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas selaku Truses Advisor sehingga kualitas Inspektorat daerah lebih profesional kearah yang lebih baik

Akhirnya, semoga laporan kinerja instansi Pemerintahan (LKIP) semester 1 tahun 2022 ini dapat menjadi pedoman bagi para pelaksana di

lingkungan inspektorat kabupaten sumedang , kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan LKIP ini, semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita . aamiin.

Sumedang, 28 Juli 2022

Inspektur Daerah Kabupaten Sumedang



**NASAM,SE.,Ak.**  
Pembina Utama Muda.IV/c  
NIP.196407071987031005

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Tugas pokok dan fungsi .....	5
1.4 Permasalahan dan Isu Strategis .....	14
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA INSPEKTORAT</b>	
2.1 Rencana strategis 2018- 2023 .....	18
2.2 Perjanjian Kinerja semester 1 tahun 2021 .....	28
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Capaian Kinerja .....	91
3.2 Realisasi anggaran semester 1 tahun 2021 .....	101
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan .....	106
4.2. Perbaikan ke depan .....	106

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Semester I sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Inspektorat Kabupaten Sumedang adalah lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat spesifik dibidang pengawasan, pelaksanaan sebagian tugas dan fungsi Inspektorat bertanggungjawab kepada Kepala Daerah sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), peran Aparat Pengawasan Intern (APIP) yang efektif diwujudkan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan intern dalam bentuk kegiatan penjaminan, kegiatan anti-korupsi, dan kegiatan layanan konsultasi (AAIPI, 2013). Pada kegiatan penjaminan, APIP menyelenggarakan kegiatan pengawasan intern dengan memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Fungsi pengawasan Inspektorat sebagaimana telah diutarakan di atas adalah bersifat konsultasi, katalis dan penjamin kualitas. Berdasarkan

definisinya, pengawasan adalah suatu usaha menjaga agar suatu tindakan sesuai dengan yang seharusnya. Tujuannya adalah agar pelaksanaan yang dilakukan memperoleh hasil sesuai dengan yang direncanakan, baik secara administrasi, keuangan, maupun manajemen.

## **1.2 Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negerayang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 No 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Ri tahun 2014 Nomor 1842);
  18. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara RI 2019 Nomor 1447);
  19. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 14);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedag Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 9);
  26. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja



- Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 153);
27. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 172 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 172);
28. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 71 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 71);
29. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 157).

### **1.3 Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 172 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Inspektorat Daerah, mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pengawasan.

Adapun tugas pokok Inspektur adalah:

- merumuskan dan menetapkan bahan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja Inspektorat Daerah;
- merumuskan, menetapkan dan mengevaluasi kebijakan rencana operasional berupa petunjuk/pedoman teknis dan standar operasional prosedur layanan pada Inspektorat Daerah;
- menetapkan administrasi dan pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian Inspektorat Daerah;
- menetapkan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten;
- mengawasi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- mengawasi kebijakan pemeriksaan atas pemberitaan media massa dan pemberitaan atas pengaduan masyarakat;
- merumuskan program kerja pengawasan tahunan Inspektorat Daerah yang meliputi ruang lingkup, sasaran pengawasan waktu dan tenaga pengawasan;
- menetapkan kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa;

- menetapkan rekomendasi dan tindak lanjut pengawasan;
- melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dengan aparat pengawas internal pemerintah dan fasilitasi pengawasan eksternal serta aparat penegak hukum;
- menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pencegahan tindak pidana korupsi;
- menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pembangunan reformasi birokrasi dan zona integritas;
- mengoordinasikan perencanaan dan pengendalian, evaluasi serta pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pada Inspektorat Daerah; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Inspektur dibantu oleh:

1. Sekretaris;
2. Inspektur Pembantu Wilayah I;
3. Inspektur Pembantu Wilayah II;
4. Inspektur Pembantu Wilayah III;
5. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
6. Inspektur Pembantu Khusus; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **1. Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Inspektur dalam melaksanakan kegiatan bidang ketatausahaan, kepegawaian, sarana kerja, keuangan dan rencana kerja Inspektorat. Adapun tugas pokok Sekretaris adalah :

- a. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis penyusunan bahan perencanaan, anggaran dan pelaporan kinerja Inspektorat Daerah;
- b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dan kegiatan di lingkup sekretariat Inspektorat Daerah;
- c. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur pelayanan Inspektorat Daerah;
- d. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan atau pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan;
- e. merumuskan bahan koordinasi, pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;

- f. mengendalikan penghimpunan, pengolahan, penilaian dan pendokumentasian laporan hasil pengawasan aparat pengawasan daerah;
- g. mengendalikan penyusunan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- h. mengendalikan penyusunan, inventarisasi dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- i. mengendalikan pelaksanaan kegiatan evaluasi mandiri peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
- j. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan ketatausahaan, administrasi persuratan dan kearsipan;
- k. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan kerumahtanggaan, kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja pada Inspektorat Daerah;
- l. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan kehumasan dan keprotokolan pada Inspektorat Daerah;
- m. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan penyusunan rencana kerja dan anggaran Inspektorat Daerah;
- n. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan administrasi keuangan dan perbendaharaan Inspektorat Daerah;
- o. merumuskan dan menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkup Inspektorat Daerah;
- p. merumuskan dan menyelenggarakan penyusunan rencana umum dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Inspektorat Daerah;
- q. merumuskan dan menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkup Inspektorat Daerah;
- r. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Inspektorat Daerah; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas, Sekretaris dibantu oleh :

- a) Kepala Subbagian Umum dan Keuangan; dan
- b) Kelompok Jabatan Fungsional.

## **2. Inspektur Pembantu Wilayah**

Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas pokok membantu Inspektur dalam melaksanakan kegiatan bidang pengawasan pemerintahan bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada Wilayah kerjanya. Adapun tugas pokok Inspektur Pembantu Wilayah adalah:

- a. merumuskan rencana dan program kerja pengawasan wilayah;
- b. merumuskan tindak lanjut pelaksanaan pengawasan wilayah;
- c. merumuskan program dan petunjuk teknis pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten pada Wilayah Kerjanya;
- d. merumuskan program pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa pada Wilayah Kerjanya;
- e. mengendalikan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten yang meliputi pemeriksaan melalui reviu dana alokasi khusus, rencana kerja dan anggaran, penyerapan anggaran, dan evaluasi sistem pengendalian intern pemerintah, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, reformasi birokrasi dan zona integritas di Wilayah Kerjanya;
- f. mengendalikan pembinaan penyelenggaraan pengawasan pada Perangkat Daerah Kabupaten, badan usaha milik daerah dan desa/kelurahan di wilayah kerjanya;
- g. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengawasan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
- h. mengendalikan pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan wilayah;  
dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsinya.

### **3. Inspektur Pembantu Wilayah**

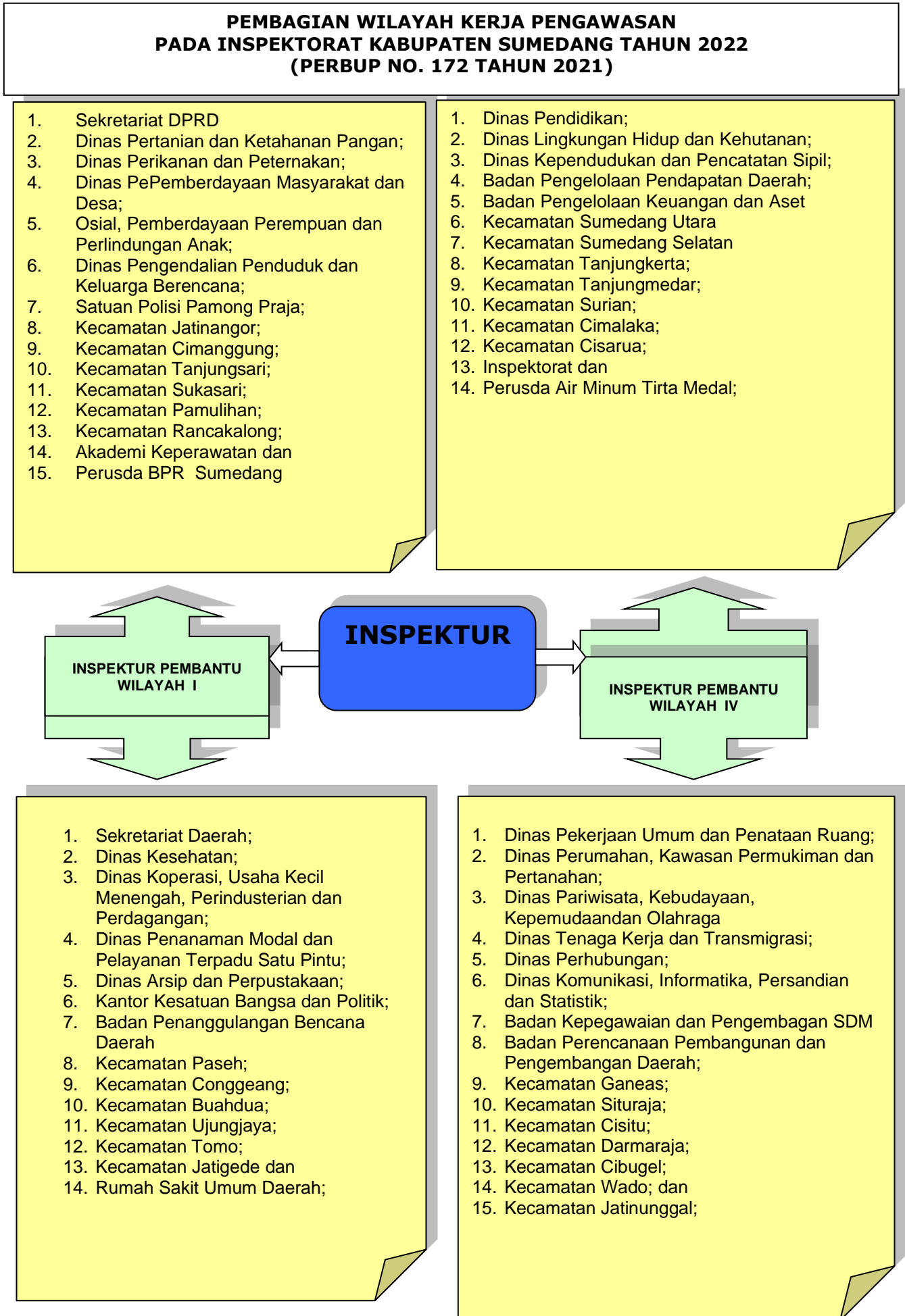
Inspektur Pembantu Khusus mempunyai Tugas Pokok membantu Inspektur dalam melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan Daerah Kabupaten dalam bidang

pengecegan dan investigasi untuk mencapai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan dibidangnya serta sebagian urusan untuk meningkatkan presentase kinerja di bidang pengecegan tindak pidana korupsi, investigasi dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi. Adapun tugas pokok Inspektur Pembantu Khusus adalah:

- a. merumuskan rencana dan program kerja pengawasan khusus;
- b. merumuskan kebijakan dan fasilitasi pengawasan dan pelaksanaan pengawasan khusus;
- c. mengendalikan pelaksanaan audit investigasi dan penanganan atas pengaduan masyarakat/lembaga atau pengaduan lainnya;
- d. mengendalikan pelaksanaan penanganan gratifikasi;
- e. merumuskan bahan dan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pengecegan korupsi;
- f. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengawasan atas laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi; mengendalikan pelaksanaan penanganan benturan kepentingan dan penanganan whistle blowing system;
- h. merumuskan bahan dan melaksanakan kegiatan evaluasi pelayanan publik;
- i. melaksanakan pengawasan melalui reviu rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten, rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten, laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan reformasi birokrasi Kabupaten;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan lain di wilayah Kabupaten Sumedang;
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsinya.

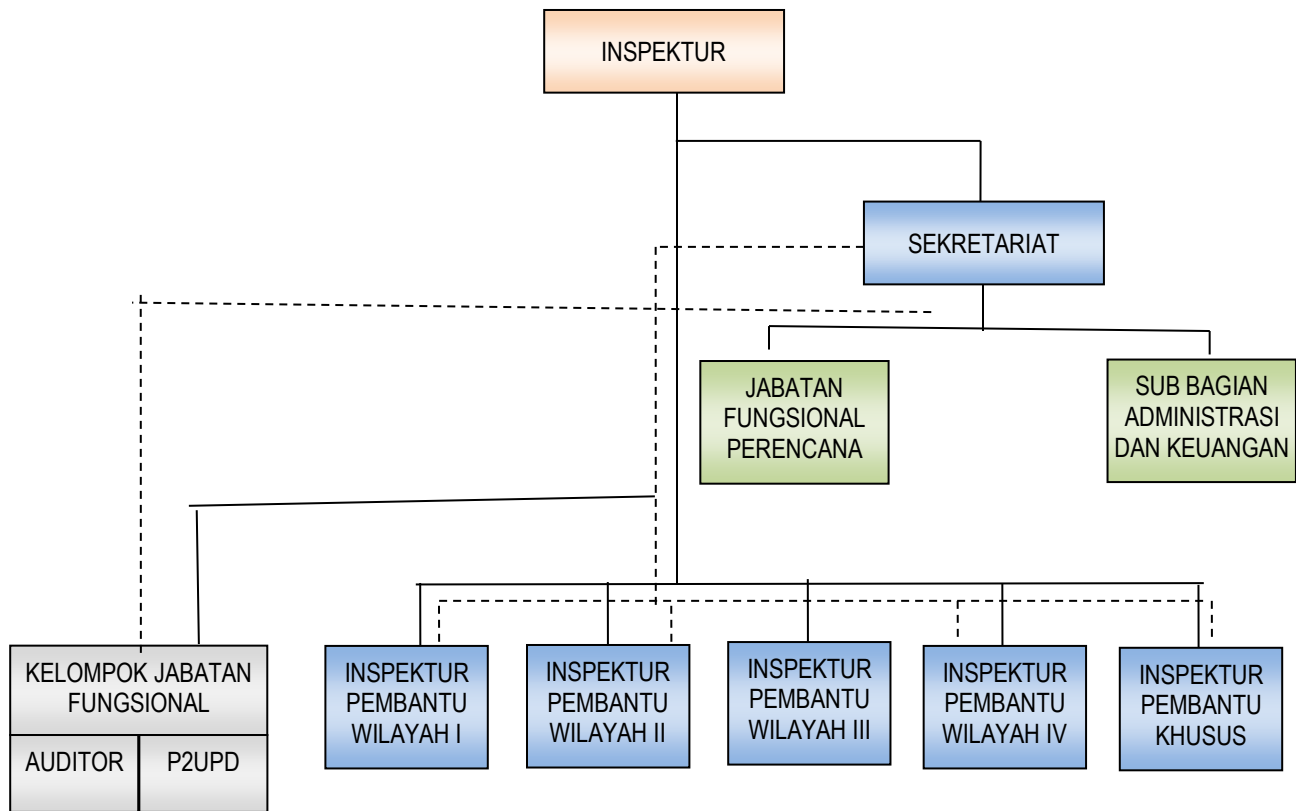
Adapun wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam uraian poin c s.d. f diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

**Gambar 1.**  
**Pembagian Wilayah Kerja Pengawasan**  
**pada Inspektorat Kabupaten Sumedang**



Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Sumedang dapat disajikan sebagaimana tampak dalam gambar dibawah ini:

**Gambar 2.**  
**Struktur Organisasi Inspektorat**



### 3. Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan tugas di bidang pengawasan, selain di bantu oleh para pejabat struktural sebagaimana tersebut di atas, Inspektur juga di bantu oleh para pejabat fungsional, di mana jabatan fungsional yang ada pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang terdiri dari 3 (tiga) Jabatan Fungsional yaitu Jabatan Fungsional Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan Jabatan Fungsional Perencana.

Tugas pokok pejabat fungsional auditor selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) melaksanakan pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Daerah (P2UPD) mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintah di daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku,

sedangkan Jabatan Fungsional Perencana mempunyai tugas menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan, dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Adapun jumlah Pejabat Fungsional yang ada pada saat ini, yaitu Fungsional Auditor sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) sebanyak 20 (dua puluh) orang, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**TABEL 1.1 JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR TAHUN 2022**

No	Jenjang Jabatan Auditor	Jumlah
1	Auditor Ahli Utama	-
2	Auditor Ahli Madya	5
3	Auditor Ahli Muda	9
4	Auditor Ahli Pertama	8
5	Auditor Terampil Pelaksana	-
6	Auditor Terampil Pelaksana Lanjutan	1
7	Auditor Terampil Penyelia	-
<b>Jumlah</b>		<b>23</b>

**TABEL 1.2 JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (P2UPD) TAHUN 2022**

No	Jenjang Jabatan P2UPD	Jumlah
1	Pengawas Pemerintah Madya	14
2	Pengawas Pemerintah Muda	5
3	Pengawas Pemerintah Pertama	1
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>

#### **4. Sumber Daya Manusia.**

Dalam rangka mendukung tugas pokoknya, Inspektorat Kabupaten Sumedang didukung oleh 59 (lima puluh sembilan) pegawai dari berbagai latar belakang keahlian/ disiplin ilmu dan pangkat golongan. Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai Inspektorat Kabupaten Sumedang dapat diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) jenjang, yaitu SLTA, D-3, S-1 dan S-2, dengan daftar sebagai berikut ini:

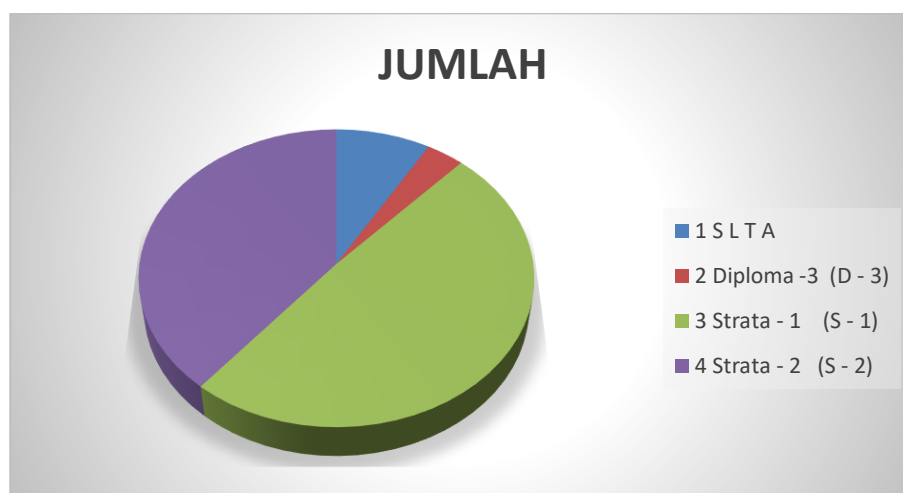
**TABEL 1.3 TINGKAT PENDIDIKAN PARA PEGAWAI INSPEKTORAT BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN**



NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S L T A	5
2	Diploma -3 (D - 3)	2
3	Strata - 1 (S - 1)	29
4	Strata - 2 (S - 2)	23
<b>J u m l a h</b>		<b>59</b>

Rincian jumlah pegawai Inspektorat berdasarkan jenjang pendidikan, ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut:

**Gambar 3.**  
**Prosentase Pegawai Inspektorat berdasarkan Tingkat Pendidikan**



Sumber: Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian Sekretariat Inspektorat Sumedang 2021

Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa paling banyak adalah golongan yang berpendidikan S-1 yaitu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang, yang kemudian diikuti oleh golongan berpendidikan S2 sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang, dan yang berpendidikan SLTA sebanyak 5 (lima) orang serta berlatar belakang pendidikan D-3 sebanyak 2 (dua) orang pegawai. Realitas tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya Inspektorat Kabupaten Sumedang memiliki Sumber Daya Manusia dengan kapasitas yang baik, namun demikian diantara pegawai Inspektorat tersebut sebagian besar adalah Pejabat Fungsional.

Apabila berdasarkan kebutuhan, antara jumlah pegawai yang ada pada saat ini di Inspektorat Kabupaten Sumedang yang berjumlah 59 (lima puluh sembilan) pegawai dibandingkan dengan jumlah SKPD yang menjadi obyek pengawasan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) OPD, 26 (dua puluh enam) Kecamatan, 270 (dua ratus tujuh puluh) Desa dan 7 (tujuh) Kelurahan, maka idealnya pegawai di Inspektorat Kabupaten Sumedang berjumlah 135 (seratus tiga puluh lima) orang pegawai, jadi masih membutuhkan sebanyak 76 (tujuh puluh enam) pegawai khususnya

untuk menduduki jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD sebanyak 49 (empat puluh sembilan) orang.

Daftar pegawai Inspektorat Kabupaten Sumedang berdasarkan Kepangkatan dan Golongan, adalah sebagai berikut:

**TABEL 1.4 KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN**

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	22
2	Golongan III	32
3	Golongan II	5

## **1.4 Permasalahan dan Isu Strategis**

### **1.4.1 Permasalahan atau Tantangan**

Adapun permasalahannya atau tantangan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Masih belum diterapkannya current audit dan pre audit;
2. Masih kurangnya analisis manajemen risiko dan peta risiko di lingkungan OPD di Pemerintah Kabupaten Sumedang;
3. Masih adanya temuan audit yang terus berulang;
4. Masih belum optimalnya proses tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK;
5. Masih rendahnya penerapan SPIP di lingkungan OPD di Pemerintah Kabupaten Sumedang;
6. Belum optimalnya penerapan audit kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;  
Masih kurangnya pemahaman pengelolaan keuangan desa oleh organisasi daerah yang terkait.

#### **7. Kurangnya Sumber Daya Manusia**

Sebagaimana telah di uraian di atas bahwa, Inspektorat Kabupaten Sumedang apabila berdasarkan kebutuhan, antara jumlah pegawai yang ada pada saat ini di Inspektorat Kabupaten Sumedang yang berjumlah 59 (lima puluh sembilan) pegawai dibandingkan dengan jumlah SKPD yang menjadi obyek pengawasan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) OPD, 26 (dua puluh enam) Kecamatan dan 270 (dua ratus tujuh puluh) Desa, maka masih terdapat kekurangan pegawai dan idealnya pegawai di Inspektorat Kabupaten Sumedang berjumlah 135 (seratus tiga puluh lima) orang pegawai, jadi masih membutuhkan sebanyak 76 (tujuh puluh enam) pegawai khususnya

untuk menduduki jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD sebanyak 49 (empat puluh sembilan) orang.

Dimana jumlah pegawai di Inspektorat sebanyak 59 (lima puluh sembilan) orang di antaranya sebanyak 49 (empat puluh sembilan) orang adalah Pejabat Fungsional, adapun kekurangan jumlah pegawai tersebut dapat digambarkan sebagaimana daftar sebagai berikut:

**Tabel 1.5 Kebutuhan Pegawai Inspektorat Berdasarkan Hasil ABK**

No	Klasifikasi Pegawai	Jumlah Pegawai Saat Ini	Jumlah Pegawai yang dibutuhkan	Kekurangan jumlah pegawai	keterangan
1.	Pejabat Struktural Eselon II b	-	1	1	
2.	Pejabat Struktural Eselon III a	3	5	2	
3.	Pejabat Struktural Eselon IV a	1	3	2	
4.	Fungsional Auditor	23	44	21	Berdasarkan analisis perhitungan pedoman formasi JFA
5.	Fungsional Auditor Kepegawaian	-	6	6	
	P2UPD	20	42	22	
6.	Fungsional Perencana				
7.	Fungsional Umum	12	34	22	
	<b>Jumlah</b>	<b>59</b>	<b>135</b>	<b>76</b>	

Sumber: Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian Sekretariat Inspektorat Sumedang 2020

#### 1.4.2 Isu Strategis Organisasi

Dalam pelaksanaan peran dan fungsi Inspektorat telah diupayakan secara optimal, namun sesuai dengan hasil pencapaian kinerjanya masih menyisakan permasalahan yang perlu diperbaiki pada periode 2018-2023. Permasalahan tersebut menjadi acuan untuk menentukan solusi dan isu strategis OPD, sebagai berikut:

**Tabel 1.6 Permasalahan dan Solusi dalam Fungsi Inspektorat Kabupaten Sumedang**

No	Aspek	Permasalahan	Solusi
1.	Permasalahan dalam Bidang Pengawasan Wilayah I, II, III, dan IV	1. Masih belum diterapkannya current audit dan pre audit;	1. Pengembangan dan penerapan current audit dan pre audit melalui aplikasi e-audit;
		2. Masih kurangnya analisis manajemen resiko dan peta resiko di lingkungan OPD di Pemkab Sumedang	2. Pendampingan penyusunan manajemen resiko dan peta resiko di lingkungan OPD
		3. Masih adanya temuan audit yang terus berulang 4. Masih belum optimalnya proses tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK;	3. Koordinasi dan komunikasi hasil temuan audit;
	Permasalahan dalam Bidang Pengawasan Wilayah I, II, III, dan IV	5. Masih rendahnya penerapan SPIP di lingkungan OPD di Pemkab Sumedang;	4. Pendampingan dan pembinaan penerapan SPIP di lingkungan OPD;
		6. Belum optimalnya penerapan audit kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;	5. Evaluasi penerapan anggaran berbasis kinerja
		7. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan OPD dan desa.	7. Peningkatan peran SIS dalam memberikan layanan katalis dan konsultasi;
		8. Masih kurangnya kuantitas SDM APIP	8. Penambahan personal APIP;
		9. Masih rendahnya akuntabilitas kinerja di lingkungan Perangkat Daerah;	9. Peningkatan kapasitas auditor terkait dalam audit berbasis kinerja 10. Evaluasi atas implementasi SAKIP Perangkat Daerah

Dari tabel di atas dapat diketahui secara singkat tentang isu strategis dari aspek permasalahan dan solusi dalam bidang pengawasan adalah

**“Optimalisasi fungsi Inspektorat sebagai Konsultan, Katalis dan Penjamin kualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang”.**

#### 1.4.3 Peluang

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah;

Adapun ketentuan mengenai pengawasan yang telah ditetapkan dalam

perundangan antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - b. Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  - c. PP nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - d. PP nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Pedoman Kebijakan Pengawasan;
2. Sudah diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah;
  3. Tingkat kepercayaan dari masyarakat dan OPD terkait peran penting Inspektorat dalam meningkatkan kinerja pembangunan daerah; Tingginya harapan masyarakat terhadap kinerja Inspektorat di bidang pengawasan dalam mengawal proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, antara lain:
    - a. Banyaknya pengaduan masyarakat mengenai permohonan pemeriksaan;
    - b. Pemberitaan di media massa mengenai penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## **B A B II**

### **PERENCANAAN KINERJA INSPEKTORAT**

#### **2.1 Rencana Strategis 2021-2023**

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Strategis (Renstra) OPD untuk jangka waktu 5 tahun dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD).

Disamping itu, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (1), menyatakan bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”, dan ayat (2) menyatakan bahwa “Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Inspektorat Kabupaten Sumedang merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam Bidang Pengawasan yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pengawasan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Inspektorat wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra Inspektorat Kabupaten Sumedang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Sumedang Periode 2018-2023. Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) tersebut akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan selama periode lima tahunan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala

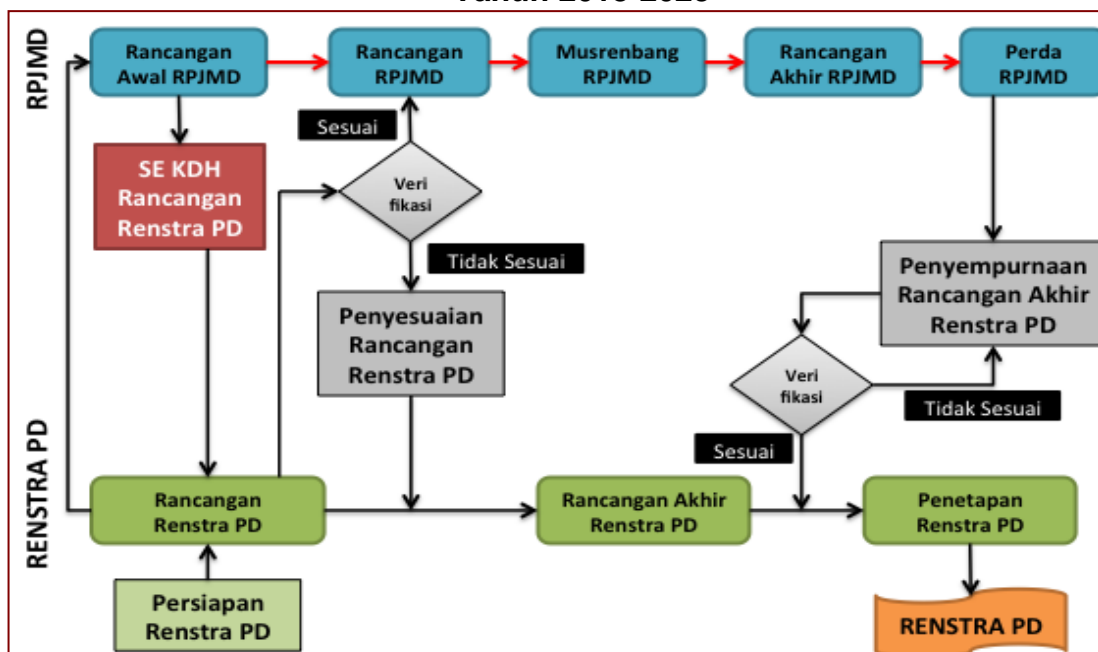
yang ada sehingga tujuan yang akan dicapai dapat secara realistis mengantisipasi perkembangan masa depan.

Renstra Inspektorat dihasilkan melalui proses penyusunan Renstra yang mengacu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang secara rinci dijabarkan dalam Lampiran peraturan tersebut. Proses penyusunan Renstra Inspektorat dilaksanakan dengan beberapa tahap, sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan rancangan Renstra Inspektorat;
2. Penyusunan rancangan Renstra Inspektorat;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra Inspektorat;
4. Penetapan Renstra Inspektorat.

Adapun bagan alir penyusunan Renstra Inspektorat yang di mulai dari penyusunan rancangan Renstra Inspektorat sampai dengan penetapan Renstra OPD dapat dilihat pada Gambar 1.1, sebagai berikut:

**Gambar 4.**  
**Proses Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023**



Dengan disusunnya Renstra Inspektorat Periode 2018-2023 maka Inspektorat diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan di Bidang Pengawasan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyelarasan kebijakan pembangunan daerah dengan setiap OPD, sehingga Inspektorat dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Kabupaten Sumedang.

### 2.1.1 Visi dan Misi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang

menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholders*.

Sesuai dengan arahan RPJMD Kabupaten Sumedang periode 2018-2023 bahwa pemerintah Kabupaten Sumedang akan mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Sumedang sesuai dengan RPJMD periode 2018-2023 sebagai berikut:

***“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023”***

Sejahtera Masyarakatnya, Agamis Akhlaqnya, Maju Daerahnya, Profesional Aparaturnya dan Kreatif Ekonominya.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun misi pemerintah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat;
2. Memperkuat norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan;
3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal;
4. Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat;
5. Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Visi dan Misi Bupati Kabupaten Sumedang 2018-2023 selanjutnya menjadi pedoman Inspektorat Kabupaten Sumedang dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat periode 2018-2023 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Inspektorat periode 2018-2023 sinkron dan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023. Adapun dalam misi tersebut, Inspektorat mengemban Misi ke 4 (empat) yakni Misi ***Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat***. Untuk mengetahui hambatan dan faktor penentu keberhasilan Inspektorat dalam mewujudkan Misi tersebut, disusun uraian dalam Tabel 9.

**Tabel 2.1 Hambatan dan Faktor Penentu Keberhasilan Inspektorat dalam**



## Mewujudkan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Periode 2018-2023

No.	Misi RPJMD (Misi Kepala Daerah) yang Terkait Peran Inspektorat	Hambatan Inspektorat Dalam Mewujudkan Misi RPJMD	Faktor Penentu Keberhasilan Inspektorat dalam Mewujudkan Misi RPJMD
1	2	3	4
	Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat	1. Masih ada temuan yang berulang 2. Masih rendahnya OPD yang memiliki SPIP	Peningkatan fungsi konsultasi, katalis dan quality assurance

### 2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan, Inspektorat terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dalam pengawasan, sehingga pengelolaan keuangan dan aset dapat dilakukan secara efektif, akuntabel dan transparan. Adapun Tujuan, Sasaran, Urusan dan Program sesuai masing – masing Misi RPJMD adalah sebagaimana Tabel dibawah ini:

**Tabel 2.2 Matrik Tujuan, Sasaran, Urusan dan Program**

NO	TUJUAN	SASARAN	URUSAN	PROGRAM
1	2	3	4	5
	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	Meningkatnya kinerja keuangan daerah yang transparan dan akuntabel;	Penunjang	Program Penataan dan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
		Meningkatnya efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas kinerja Pemda		Program Penegakan Integritas
				Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
				Program Penataan dan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

### 2.1.3 Strategi (Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran)

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Inspektorat. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Inspektorat harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan

secara nyata baik oleh aparaturnya maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Untuk memperjelas permasalahan yang sedang dihadapi serta membantu perumusan strategi secara lebih tepat dan terarah, dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Manfaat SWOT bagi perumusan strategi dapat dijelaskan dengan matriks sebagai berikut:

**Tabel 2.3 Matriks Analisis SWOT**

		EKSTERNAL	
		PELUANG	ANCAMAN/TANTANGAN
I N T E R N A L	K E K U A T A N	<b>Strategi Kd I :</b> <i>Memanfaatkan kekuatan untuk merebut peluang</i>	<b>Strategi Kd II :</b> Menggunakan kekuatan untuk menghilangkan ancaman
	K E L E M A H A N	<b>Strategi Kd III :</b> Menghilangkan kelemahan untuk merebut peluang	<b>Strategi Kd IV :</b> Menghilangkan kelemahan untuk mengatasi ancaman

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tugas pokok dan fungsi Inspektorat, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam RPJMD serta telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis.

Selama periode 2014-2018, pelaksanaan peran dan fungsi Inspektorat telah diupayakan secara optimal, namun sesuai dengan hasil pencapaian kinerjanya masih menyisakan permasalahan yang perlu diperbaiki pada periode 2018-2023. Permasalahan tersebut menjadi acuan untuk menentukan solusi dan isu strategis OPD, sebagai berikut:

**Tabel 2.4 Isu Strategis dalam Fungsi Inspektorat Kabupaten Sumedang**

No	Aspek	Permasalahan	Solusi/Isu Strategis
1.	Permasalahan dalam Bidang Pengawasan Wilayah I, II, III, dan IV	1. Masih belum diterapkannya current audit dan pre audit;	1. Pengembangan dan penerapan current audit dan pre audit melalui aplikasi e-audit;

		2. Masih kurangnya analisis manajemen resiko dan peta resiko di lingkungan OPD di Pemkab Sumedang	2. Pendampingan penyusunan manajemen resiko dan peta resiko di lingkungan OPD
		3. Masih adanya temuan audit yang terus berulang 4. Masih belum optimalnya proses tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK;	3. Koordinasi dan komunikasi hasil temuan audit;
	Permasalahan dalam Bidang Pengawasan Wilayah I, II, III, dan IV	5. Masih rendahnya penerapan SPIP di lingkungan OPD di Pemkab Sumedang;	4. Pendampingan dan pembinaan penerapan SPIP di lingkungan OPD;
		6. Belum optimalnya penerapan audit kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;	5. Evaluasi penerapan anggaran berbasis kinerja
		7. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan OPD dan desa.	7. Peningkatan peran SIS dalam memberikan layanan katalis dan konsultasi;
		8. Masih kurangnya kuantitas SDM APIP	8. Penambahan personal APIP;
	9. Masih rendahnya akuntabilitas kinerja di lingkungan Perangkat Daerah;	9. Peningkatan kapasitas auditor terkait dalam audit berbasis kinerja 10. Evaluasi atas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	

Dari tabel di atas dapat diketahui secara singkat tentang isu strategis dari aspek permasalahan dan solusi dalam bidang pengawasan adalah **“Optimalisasi fungsi Inspektorat sebagai Konsultan, Katalis dan Penjamin Kualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang”**.

Penentuan strategi-strategi sebagaimana diuraikan diatas, pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan arah pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat terutama dalam rangka terlaksananya pengawasan secara optimal. Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Inspektorat Kabupaten Sumedang menetapkan strategi di antaranya:

1. Memanfaatkan kualitas aparatur yang memadai untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terkait peran penting Inspektorat dalam meningkatkan kinerja pembangunan daerah;
2. Memanfaatkan komitmen pimpinan yang baik untuk mempertahankan opini WTP;

3. Memanfaatkan kapabilitas APIP dalam rangka penguatan peran pembinaan terhadap OPD;
4. Pelibatan APIP untuk meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Pemerintah Daerah
5. Gunakan SOTK dan SOP untuk merubah paradigma dari perangkat daerah tentang fungsi Inspektorat
6. Gunakan SOTK dan SOP untuk penerapan SPIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang
7. Peningkatan kuantitas aparatur fungsional pengawasan yang bersertifikat;
8. Peningkatan sarana pendukung pelaksanaan pengawasan;
9. Peningkatan akses informasi dalam rangka optimalisasi penggunaan sistem informasi dalam proses pengawasan
10. Peningkatan kuantitas SDM untuk penerapan SPIP Perangkat Daerah di lingkungan OPD

#### **2.1.4 Arah Kebijakan**

Arah kebijakan yang diterapkan oleh Inspektorat Kabupaten Sumedang adalah:

1. Memanfaatkan kualitas aparatur yang memadai untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terkait peran penting Inspektorat dalam meningkatkan kinerja pembangunan daerah;
2. Memanfaatkan komitmen pimpinan yang baik untuk mempertahankan opini WTP;
3. Memanfaatkan kapabilitas APIP dalam rangka penguatan peran pembinaan terhadap OPD;
4. Melibatkan APIP untuk meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Pemerintah Daerah
5. Menggunakan SOTK dan SOP untuk merubah paradigma dari perangkat daerah tentang fungsi Inspektorat
6. Menggunakan SOTK dan SOP untuk penerapan SPIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang
7. Meningkatkan kuantitas aparatur fungsional pengawasan yang bersertifikat;
8. Meningkatkan sarana pendukung pelaksanaan pengawasan;
9. Meningkatkan akses informasi dalam rangka optimalisasi penggunaan sistem informasi dalam proses pengawasan
10. Meningkatkan kuantitas SDM untuk penerapan SPIP Perangkat Daerah di lingkungan OPD

#### **2.1.5 Program Perangkat Daerah**

Program/kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Inspektorat sebagai institusi yang melaksanakan pelayanan pengawasan.

Dalam rangka mendukung terwujudnya agenda pembangunan Kabupaten Sumedang serta tercapainya Visi dan Misi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah, maka ditetapkan rencana Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas tahun 2018-2023.

Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang pada Strategi 2018-2023 menetapkan:

**Tujuan:**“ Mewujudkan Inspektorat sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang”

**Indikator Tujuan:**

1. Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten Sumedang

**Sasaran:**

1. Optimalnya fungsi Inspektorat sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.

**Indikator Sasaran:**

- a. Persentase Penerapan SPIP pada Organisasi Perangkat Daerah
- b. Persentase Nilai SAKIP kategori Baik (B) pada Organisasi Perangkat Daerah
- c. Tingkat Kapabilitas APIP / Internal Audit Capability Model (IACM)
- d. Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM

- e. Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan rekomendasi
- f. Persentase Penurunan Temuan penyimpangan terhadap APBD

**Program:**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program ini terdiri dari 7 kegiatan dan 35 sub kegiatan yang diantaranya adalah sebagai berikut,

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
  - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
  - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
  - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
  - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.
  - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
  - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
  - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan
  - 3) Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD.
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
  - 1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.
  - 2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
  - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
  - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
  - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
  - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
  - 1) Pengadaan Sarana & Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- f. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
  - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
  - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
  - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

## 2. Program Penyelenggaraan Pengawasan.

Program ini terdiri dari 2 kegiatan dan 9 sub kegiatan yang diantaranya adalah sebagai berikut,

### a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal.

- 1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah.
- 2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah.
- 3) Reviu Laporan Kinerja.
- 4) Reviu Laporan Keuangan.
- 5) Pengawasan Desa.
- 6) Kerjasama Pengawasan Internal.
- 7) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.

### b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.

- 1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
- 2) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

## 3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi.

Program ini terdiri dari 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan yang diantaranya adalah sebagai berikut,

### a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan.

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan.
- 2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan.

### b. Pendampingan dan Asistensi.

- 1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah.
- 2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi.
- 3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
- 4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

Program dan Kegiatan yang ditetapkan pada intinya bertujuan untuk terwujudnya peningkatan kinerja sumber daya manusia aparatur Inspektorat, peningkatan dan pengembangan pengawasan serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

## 2.2 Perjanjian Kinerja Semester 1 Tahun 2022

### 2.2.1 Penetapan Kinerja Semester 1 Tahun 2022

Penetapan kinerja merupakan komitmen untuk mewujudkan rencana kinerja tahunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Ruang lingkup penetapan kinerja mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Sumedang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap program utama organisasi, yaitu program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Sumedang saat ini, adapun Perjanjian kinerja tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.5 Penetapan Kinerja Inspektorat Semester 1 Tahun 2022.**

<b>SASARAN</b>		
<b>URAIAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
Optimalnya fungsi Inspektorat Daerah sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan rekomendasi	92%
	Maturitas SPIP	Level 3+
	Persentase Penurunan Temuan penyimpangan terhadap APBD	5%
	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP	67,08%
	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM	100%
Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	SAKIP Perangkat Daerah	-Kategori A
	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah	32 Poin



Tabel 2.6 Target Kinerja Inspektorat TA 2022

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-2021	Keterangan	Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6	11				
1	Mewujudkan Inspektorat sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang		Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Kab. Sumedang	Level 3 DC	Level 4	Internal Audit Capability Model (IACM) merupakan suatu model universal yang membandingkan prinsip, praktik, dan proses yang dapat diterapkan secara global untuk meningkatkan efektivitas audit internal.				
		Optimalnya fungsi Inspektorat sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang	Persentase Penerapan SPIP pada Organisasi Perangkat Daerah	20%	90%	$= \frac{\sum OPD \text{ yang sudah menerapkan SPIP}}{\sum \text{seluruh OPD}}$ Formulasi diatas dimaksudkan untuk mengetahui persentase implementasi SPIP di setiap OPD yang berjumlah 55 OPD, dalam rangka penilaian level maturitas SPIP di setiap OPD tersebut dilihat dari hasil penilaian Self assessment (SA) yang terbagi dalam 5 unsur (1. lingkungan pengendalian, 2. Penilaian resiko, 3. kegiatan pengendalian, 4. Informasi dan komunikasi, 5. Pemantauan pengendalian intern)				
								Program Penataan dan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase pemenuhan unsur SPIP	%

					1. Monitoring dan Evaluasi SPIP	Jumlah Laporan Monitoring dan evaluasi maturitas SPIP	Dokumen	47
				$= \frac{\sum \text{SAKIP OPD yang bernilai B}}{\sum \text{seluruh SAKIP OPD yang dievaluasi}}$ <p>Formulasi diatas dimaksudkan untuk mengetahui persentase nilai evaluasi SAKIP pada setiap OPD yang berkategori (B) dengan nilai range &gt;60 – 70, dengan intepretasi Baik, artinya Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.</p> <p>Organisasi Perangkat Daerah (OPD) oleh Inspektorat yang akuntabilitas kinerjanya dengan kategori “Sangat Baik” dengan cara menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif instansi pemerintah dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dasar hukum yang digunakan untuk menilai laporan SAKIP adalah Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Data diperoleh dengan membandingkan persentase nilai evaluasi SAKIP OPD yang akuntabilitas kinerjanya dengan kategori “ Sangat Baik” dengan jumlah OPD yang dievaluasi.</p>				
		Persentase Nilai SAKIP kategori Baik (B) pada Organisasi Perangkat Daerah	36%	90%				
					Program Penataan dan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase SAKIP Perangkat Daerah yang dievaluasi	%	60

				1. Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil reviu RPJMD dan RKPD Kabupaten Sumedang	Dokumen	2
				1. Reviu Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil reviu Renstra, Renja, KUA PPAS, RKA SKPD	Dokumen	4
				2. Reviu Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan hasil Reviu LKPD, Penyerapan Anggaran SKPD, Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa SKPD	Dokumen	4
				3. Reviu LAKIP dan Evaluasi SAKIP	Jumlah laporan hasil Evaluasi LKIP Pemda dan SKPD	Dokumen	2
	Tingkat Kapabilitas APIP / Internal Audit Capability Model (IACM)	Level 3 DC	Level 4	IACM bertujuan untuk memperkuat atau meningkatkan audit internal melalui langkah evolusi kecil yang disusun menjadi lima level kapabilitas progresif, yaitu: Level 1 : Initial, Level 2 : Infrastructure, Level 3 : Integrated, Level 4 : Managed, Level 5 : Optimizing Setiap level kapabilitas menggambarkan karakteristik dan kapabilitas unit audit internal yang bersangkutan. Semakin tinggi level kapabilitas APIP, menunjukkan semakin meningkatnya ukuran, kompleksitas maupun risiko organisasi. Pada masing-masing level kapabilitas tersebut, terdapat enam elemen audit internal, yaitu: Peran dan layanan audit intern; Manajemen SDM; Praktik profesional; Manajemen kinerja dan akuntabilitas; Hubungan dan budaya organisasi; Struktur tata kelola.			



						Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah				
							Program Penegakan Integritas	Cakupan Zona Integritas	%	100
							1. Pencegahan Korupsi	Jumlah pencegahan korupsi (pengendalian gratifikasi, monev aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan rencana aksi dan pemberantasan korupsi, penilaian internal ZI, verifikasi LHKPN dan LHKASN)	Dokumen	5
			Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan rekomendasi	75%	90%	$= \frac{\sum \text{temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{seluruh temuan hasil pemeriksaan}} \times 100\%$ <p>untuk mengukur persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK-RI dan APIP yang selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dengan cara membandingkan jumlah temuan yang selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dengan jumlah temuan. Sedangkan persentase peningkatan adalah peningkatan persentase temuan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya</p>				
							Program Penataan dan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah temuan hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti berdasarkan aspek pemeriksaan	buah	380
							1. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah dokumen laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan	Dokumen	1

							2. Monitoring dan evaluasi TLHP BPK	Jumlah Laporan Monitoring dan evaluasi TLHP BPK	Dokumen	156
			Persentase Penurunan Temuan penyimpangan terhadap APBD	8,79%	6%	$= \frac{\sum \text{temuan penyimpangan terhadap APBD}}{\sum \text{seluruh temuan hasil pemeriksaan}}$ <p>untuk mengukur persentase penurunan temuan dari penyimpangan keuangan APBD hasil pemeriksaan APIP dengan cara membandingkan jumlah seluruh temuan hasil pemeriksaan APIP</p>				
							Program Penataan dan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	persentase perangkat daerah dan pemerintah desa yang berkonsultasi	%	22,44
							1. Pelayanan Konsultasi Pengawas	Jumlah SKPD dan Desa yang berkonsultasi	Buah	50
							Program Penataan dan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah temuan hasil pengawasan berdasarkan aspek pemeriksaan	Buah	500
							1. Pemeriksaan Internal Secara Berkala	Jumlah dokumen laporan hasil pemeriksaan (LHP)	LHP	44 LHP PD/84 LHP Desa
							2. Pemeriksaan Khusus	Jumlah dokumen laporan hasil pemeriksaan (LHP)	Dokumen LHP	3
							3. Pemeriksaan dengan Tujuan tertentu	Jumlah dokumen laporan hasil pemeriksaan (LHP)	Dokumen LHP	3

							4.Penyelenggaraan Sapu Bersih Pungutan Liar	Jumlah dokumen aksi saber Pungli dan sosialisasi saber pungli	Dokumen	1
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---------	---

**Tabel 2.7 OUTCOME PROGRAM KINERJA**

No. (1)	Program (2)	Outcome (4)	Target (5)
1.	Program Penataan dan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase pemenuhan unsur SPIP	100%
		Persentase SAKIP Perangkat Daerah yang dievaluasi	100%
		Jumlah temuan hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti berdasarkan aspek pemeriksaan	371
		Jumlah temuan hasil pengawasan berdasarkan aspek pemeriksaan	475
		persentase perangkat daerah dan pemerintah desa yang berkonsultasi	31.25%
2.	Program Peningkatan Profesional Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase pegawai yang mengikuti pelatihan	41.67%
		Persentase elemen IACM yang terpenuhi	100%
3.	Program Penegakan Integritas	Cakupan Zona Integritas	100%

### 2.2.2 Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dan pemerintahan desa maka telah disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2021 dengan Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 700/Kep.8-Inspektorat/2020. Adapun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2021 adalah sebagai berikut:



**Tabel 2.8 Program Kerja Pengawasan Tahunan 2021**

No	Objek Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan / Kegiatan	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu (Hari)			RMP	RPL	LHA	Peralatan	Keterangan		
					D K	L K	H P					SUDAH TEREALISASI	SEBAGIA N	BELUM TEREALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14	15	16	17	18
I	6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal													
A	6.01.02.2.01 .01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah													
1	Minitoring dan Evaluasi Majamenen Resiko	Monev	Tahun 2021 dan 2022	Inspektur Pembantu Wilayah I	5	0	5	01.06	03.06	11 buah	Kendaraan	Sudah terealisasi		
				1 orang Penanggungjawab				Minggu ke-1	Minggu ke-3		Laptop			
				1 orang Pembantu Penanggungjawab				Juni 2022	Juni 2022					
				1 orang Pengendali Teknis										
				1 orang Ketua Tim										
				7 orang Anggota Tim										

				Inspektur Pembantu Wilayah II	5	0	5	01.06	03.06	9 buah	Kendaraan			
				1 orang Penanggungjawab				Minggu ke-1	Minggu ke-3		Laptop			
				1 orang Pembantu Penanggungjawab				Juni 2022	Juni 2022					
				1 orang Pengendali Teknis										
				1 orang Ketua Tim										
				8 orang Anggota Tim										
				Inspektur Pembantu Wilayah III	5	0	5	01.06	03.06	11 buah	Kendaraan			
				1 orang Penanggungjawab				Minggu ke-1	Minggu ke-3		Laptop			
				1 orang Pembantu Penanggungjawab				Juni 2022	Juni 2022					
				1 orang Pengendali Teknis										
				1 orang Ketua Tim										
				6 orang Anggota Tim										
				Inspektur Pembantu Wilayah IV	5	0	5	01.06	03.06	14 buah	Kendaraan			
				1 orang Penanggungjawab				Minggu ke-1	Minggu ke-3		Laptop			

				1 orang Pembantu Penanggungjawab				Juni 2022	Juni 2022					
				1 orang Pengendali Teknis										
				1 orang Ketua Tim										
				6 orang Anggota Tim										
				Inspektur Pembantu Khusus	5	0	5	01.06	03.06	10 buah	Kendaraan			
				1 orang Penanggungjawab				Minggu ke-1	Minggu ke-3		Laptop			
				1 orang Pembantu Penanggungjawab				Juni 2022	Juni 2022					
				1 orang Pengendali Teknis										
				1 orang Ketua Tim										
				5 orang Anggota Tim										
2	Evaluasi SPIP terintegrasi	Monitoring dan Evaluasi	Tahun 2021	Inspektur Pembantu Wilayah I	10	0	10	01.07	03.07	11 buah	Kendaraan			Belum terealisasi
				1 orang Penanggungjawab				Minggu ke-1	Minggu ke-3		Laptop			
				1 orang Pembantu Penanggungjawab				Juli 2022	Juli 2022					

				1 orang Pengendali Teknis										
				1 orang Ketua Tim										
				7 orang Anggota Tim										
				Inspektur Pembantu Wilayah II	10	0	10	01.07	03.07	9 buah	Kendaraan			
				1 orang Penanggungjawab				Minggu ke-1	Minggu ke-3		Laptop			
				1 orang Pembantu Penanggungjawab				Juli 2022	Juli 2022					
				1 orang Pengendali Teknis										
				1 orang Ketua Tim										
				8 orang Anggota Tim										
				Inspektur Pembantu Wilayah III	10	0	10	01.07	03.07	11 buah	Kendaraan			
				1 orang Penanggungjawab				Minggu ke-1	Minggu ke-3		Laptop			
				1 orang Pembantu Penanggungjawab				Juli 2022	Juli 2022					
				1 orang Pengendali Teknis										
				1 orang Ketua Tim										

				6 orang Anggota Tim										
				Inspektur Pembantu Wilayah IV	10	0	10	01.07	03.07	14 buah	Kendaraan			
				1 orang Penanggungjawab				Minggu ke-1	Minggu ke-3		Laptop			
				1 orang Pembantu Penanggungjawab				Juli 2022	Juli 2022					
				1 orang Pengendali Teknis										
				1 orang Ketua Tim										
				6 orang Anggota Tim										
				Inspektur Pembantu Khusus	10	0	10	01.07	03.07	10 buah	Kendaraan			
				1 orang Penanggungjawab				Minggu ke-1	Minggu ke-3		Laptop			
				1 orang Pembantu Penanggungjawab				Juli 2022	Juli 2022					
				1 orang Pengendali Teknis										
				1 orang Ketua Tim										
				5 orang Anggota Tim										

3	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (Audit Kinerja terkait Penurunan Kemiskinan)											Sudah terealisasi		
a	Audit Pendahuluan													
	Inspektur Pembantu Wilayah I													
	Melaksanakan Audit Kinerja Pendahuluan atas Program Penurunan Kemiskinan Tahun 2021, pada Dinas Sosial Kabupaten Sumedang	Audit Kinerja	Tahun Anggaran 2021	1 orang Penanggungjawab	10	0	10	02.01	04.01	1 buah	Kendaraan			
				1 orang Pembantu Penanggungjawab				Minggu ke-2	Minggu ke-4		Laptop			
				1 orang Pengendali Teknis				Januari 2022	Januari 2022					
				1 orang Ketua Tim										
				9 orang Anggota Tim										
	Inspektur Pembantu Wilayah II													
	Melaksanakan Audit Kinerja Pendahuluan atas Program Penurunan Kemiskinan Tahun 2021, pada Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang	Audit Kinerja	Tahun Anggaran 2021	1 orang Penanggungjawab	10	0	10	02.01	04.01	1 buah	Kendaraan			
				1 orang Pembantu Penanggungjawab				Minggu ke-2	Minggu ke-4		Laptop			

				1 orang Pengendali Teknis				Januari 2022	Januari 2022					
				1 orang Ketua Tim										
				8 orang Anggota Tim										
	Inspektur Pembantu Wilayah III													
	Melaksanakan Audit Kinerja Pendahuluan atas Program Penurunan Kemiskinan Tahun 2021, pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang	Audit Kinerja	Tahun Anggaran 2021	1 orang Penanggungjawab	10	0	10	02.01	04.01	1 buah	Kendaraan			
				1 orang Pembantu Penanggungjawab				Minggu ke-2	Minggu ke-4		Laptop			
				1 orang Pengendali Teknis				Januari 2022	Januari 2022					
				1 orang Ketua Tim										
				4 orang Anggota Tim										
	Melaksanakan Audit Kinerja Pendahuluan atas Program Penurunan Kemiskinan Tahun 2021, pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang	Audit Kinerja	Tahun Anggaran 2021	1 orang Penanggungjawab	10	0	10	02.01	04.01	1 buah	Kendaraan			

				1 orang Pembantu Penanggungjawab				Minggu ke-2	Minggu ke-4		Laptop			
				1 orang Pengendali Teknis				Januari 2022	Januari 2022					
				1 orang Ketua Tim										
				4 orang Anggota Tim										
	Inspektur Pembantu Wilayah IV													
	Melaksanakan Audit Kinerja Pendahuluan atas Program Penurunan Kemiskinan Tahun 2021, pada Dinas Sosial Kabupaten Sumedang	Audit Kinerja	Tahun Anggaran 2021	1 orang Penanggungjawab	10	0	10	02.01	04.01	1 buah	Kendaraan			
				1 orang Pembantu Penanggungjawab				Minggu ke-2	Minggu ke-4		Laptop			
				1 orang Pengendali Teknis				Januari 2022	Januari 2022					
				1 orang Ketua Tim										
				9 orang Anggota Tim										
b	Audit Kinerja terkait Penurunan Kemiskinan	Audit Kinerja	Tahun Anggaran 2021	1 orang Penanggungjawab	20	0	20	02.02	03.03	1 buah	Kendaraan	Sudah terealisasi		



				1 orang Pembantu Penanggungjawab				Minggu ke-2	Minggu ke-3		Laptop			
				1 orang Pengendali Teknis				Pebruari 2022	Maret 2022					
				1 orang Ketua Tim										
				8 orang Anggota Tim										
4	Evaluasi PPRG	Evaluasi		1 orang Penanggungjawab	7	0	7	03.06	01.07	1 buah	Laptop			Belum terealisasi
				1 orang Pembantu Penanggungjawab				Minggu ke-3	Minggu ke-1					
				1 orang Pengendali Teknis				Juni 2022	Juli 2022					
				1 orang Ketua Tim										
				5 orang Anggota Tim										
5	Evaluasi Pelayanan Publik	Evaluasi		1 orang Penanggungjawab	7	0	7	03.06	01.07	1 buah	Laptop			Belum terealisasi
				1 orang Pembantu Penanggungjawab				Minggu ke-3	Minggu ke-1					
				1 orang Pengendali Teknis				Juni 2022	Juli 2022					
				1 orang Ketua Tim										
				5 orang Anggota Tim										

B	6.01.02.2.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah													
1	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala													Belum terealisasi
a	Audit Pendahuluan													
	tematik : peningkatan pendapatan	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2021 dan 2022	1 orang Penanggungjawab	4	0	4	01.08	02.08	1 buah	Kendaraan			
				1 orang Pembantu Penanggungjawab				Minggu ke-1	Minggu ke-2		Laptop			
				1 orang Pengendali Teknis				Agustus 2022	Agustus 2022					
				1 orang Ketua Tim										
				4 orang Anggota Tim										
2	Inspektur Pembantu Wilayah I													
a	tematik : peningkatan pendapatan	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2021 dan 2022	1 orang Penanggungjawab	16	0	16	02.08	01.09	1 buah	Kendaraan			
				1 orang Pembantu Penanggungjawab				Minggu ke-2	Minggu ke-1		Laptop			
				1 orang Pengendali Teknis				Agustus 2022	September 2022					

				1 orang Ketua Tim										
				7 orang Anggota Tim										
b	Inspektur Pembantu Wilayah II													
	tematik : peningkatan pendapatan	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2021 dan 2022	1 orang Penanggungjawab	16	0	16	02.08	01.09	1 buah	Kendaraan			
				1 orang Pembantu Penanggungjawab				Minggu ke-2	Minggu ke-1		Laptop			
				1 orang Pengendali Teknis				Agustus 2022	September 2022					
				1 orang Ketua Tim										
				8 orang Anggota Tim										
c	Inspektur Pembantu Wilayah III				16	0	16	02.08	01.09					
	tematik : peningkatan pendapatan	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2021 dan 2022	1 orang Penanggungjawab				Minggu ke-2	Minggu ke-1	1 buah	Kendaraan			
				1 orang Pembantu Penanggungjawab				Agustus 2022	September 2022		Laptop			
				1 orang Pengendali Teknis										
				1 orang Ketua Tim										
				6 orang Anggota Tim										
d	Inspektur Pembantu Wilayah IV				16	0	16	02.08	01.09					

	tematik : peningkatan pendapatan	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2021 dan 2022	1 orang Penanggungjawab				Minggu ke-2	Minggu ke-1	1 buah	Kendaraan			
				1 orang Pembantu Penanggungjawab				Agustus 2022	September 2022		Laptop			
				1 orang Pengendali Teknis										
				1 orang Ketua Tim										
				6 orang Anggota Tim										
e	Inspektur Pembantu Khusus				16	0	16	02.08	01.09					
	tematik : peningkatan pendapatan	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2021 dan 2022	1 orang Penanggungjawab				Minggu ke-2	Minggu ke-1	1 buah	Kendaraan			
				1 orang Pembantu Penanggungjawab				Agustus 2022	September 2022		Laptop			
				1 orang Pengendali Teknis										
				1 orang Ketua Tim										
				5 orang Anggota Tim										
3	Pelaporan													
	tematik : peningkatan pendapatan	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2021 dan 2022	1 orang Penanggungjawab	4	0	4	01.09	02.09	1 buah	Kendaraan			

				1 orang Pembantu Penanggungjawab				Minggu ke-1	Minggu ke-2		Laptop			
				1 orang Pengendali Teknis				September 2022	September 2022					
				1 orang Ketua Tim										
				4 orang Anggota Tim										
C	6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja												
		Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah												
		Reviu Renstra (Rencana Strategis)	Reviu	Tahun 2022	1 orang Penanggungjawab	10	0	10	01.01	02.01	55 buah	Kendaraan	Sudah terealisasi	
					1 orang Pembantu Penanggungjawab				Minggu ke-1	Minggu ke-2				
					1 orang Pengendali Teknis				Januari 2022	2 Januari 2022		Laptop		
					1 orang Ketua Tim									6
					5 orang Anggota Tim									
		Reviu RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)	Reviu	Tahun 2023	1 orang Penanggungjawab	5	0	5	04.06	02.07	1 buah	Kendaraan	Sudah terselaisasi	
					1 orang Pembantu Penanggungjawab				Minggu ke-4	Minggu ke-3				
					1 orang Pengendali Teknis				Juni 2022	Juli 2022		Laptop		

				1 orang Ketua Tim										
				4 orang Anggota Tim										
	Reviu RKPD Perubahan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan)	Reviu	Tahun 2022	1 orang Penanggungjawab	5	0	5	01.07	03.07	1 buah	Kendaraan	Sudah terselaisasi		
				1 orang Pembantu Penanggungjawab				Minggu ke-1	Minggu ke-3					
				1 orang Pengendali Teknis				Juli 2022	Juli 2022		Laptop			
				1 orang Ketua Tim										
				4 orang Anggota Tim										
	Reviu KUA PPAS	Reviu	Tahun 2023	1 orang Penanggungjawab	6	0	6	02.07	04.07	1 buah	Kendaraan			belum terealisasi
				1 orang Pembantu Penanggungjawab				Minggu ke-2	Minggu ke-4		Laptop			
				1 orang Pengendali Teknis				Juli 2022	Juli 2022					
				1 orang Ketua Tim										
				5 orang Anggota Tim										

	Reviu KUPA dan PPAS Perubahan	Reviu	Tahun 2022	1 orang Penanggungjawab	5	0	5	03.07	01.08	1 buah	Kendaraan			belum terealisasi
				1 orang Pembantu Penanggungjawab				Minggu ke-3	Minggu ke-1		Laptop			
				1 orang Pengendali Teknis				Juli 2022	Agustus 2022					
				1 orang Ketua Tim										
				5 orang Anggota Tim										
	Reviu Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
	Reviu RKA Perubahan	Reviu	Tahun 2022	Inspektur Pembantu Wilayah I	5	0	5	01.09	03.09	11 buah	Kendaraan			belum terealisasi
				1 orang Penanggungjawab				Minggu ke-1	Minggu ke-3		Laptop			
				1 orang Pembantu Penanggungjawab				September 2022	September 2022					
				1 orang Pengendali Teknis										
				1 orang Ketua Tim										
				7 orang Anggota Tim										
				Inspektur Pembantu Wilayah II	5	0	5	01.09	03.09	9 buah	Kendaraan			

				1 orang Penanggungjawab				Minggu ke-1	Minggu ke-3		Laptop			
				1 orang Pembantu Penanggungjawab				September2022	September2022					
				1 orang Pengendali Teknis										
				1 orang Ketua Tim										
				8 orang Anggota Tim										
				Inspektur Pembantu Wilayah III	5	0	5	01.09	03.09	11 buah	Kendaraan			
				1 orang Penanggungjawab				Minggu ke-1	Minggu ke-3		Laptop			
				1 orang Pembantu Penanggungjawab				September2022	September2022					
				1 orang Pengendali Teknis										
				1 orang Ketua Tim										
				6 orang Anggota Tim										
				Inspektur Pembantu Wilayah IV	5	0	5	01.09	03.09	14 buah	Kendaraan			
				1 orang Penanggungjawab				Minggu ke-1	Minggu ke-3		Laptop			



				1 orang Pembantu Penanggungjawab				September2022	September2022					
				1 orang Pengendali Teknis										
				1 orang Ketua Tim										
				6 orang Anggota Tim										
				Inspektur Pembantu Wilayah Khusus	5	0	5	01.09	03.09	10 buah	Kendaraan			
				1 orang Penanggungjawab				Minggu ke-1	Minggu ke-3		Laptop			
				1 orang Pembantu Penanggungjawab				September2022	September2022					
				1 orang Pengendali Teknis										
				1 orang Ketua Tim										
				5 orang Anggota Tim										
	Reviu RKA	Reviu	Tahun 2023	Inspektur Pembantu Wilayah I	5	0	5	02.09	04.09	11 buah	Kendaraan			belum terealisasi
				1 orang Penanggungjawab				Minggu ke-2	Minggu ke-4		Laptop			

				1 orang Pembantu Penanggungjawab				September2022	September2022					
				1 orang Pengendali Teknis										
				1 orang Ketua Tim										
				7 orang Anggota Tim										
				Inspektur Pembantu Wilayah II	5	0	5	02.09	04.09	9 buah	Kendaraan			
				1 orang Penanggungjawab				Minggu ke-2	Minggu ke-4		Laptop			
				1 orang Pembantu Penanggungjawab				September2022	September2022					
				1 orang Pengendali Teknis										
				1 orang Ketua Tim										
				8 orang Anggota Tim										
				Inspektur Pembantu Wilayah III	5	0	5	02.09	04.09	11 buah	Kendaraan			
				1 orang Penanggungjawab				Minggu ke-2	Minggu ke-4		Laptop			
				1 orang Pembantu Penanggungjawab				September2022	September2022					

				1 orang Pengendali Teknis										
				1 orang Ketua Tim										
				6 orang Anggota Tim										
				Inspektur Pembantu Wilayah IV	5	0	5	02.09	04.09	14 buah	Kendaraan			
				1 orang Penanggungjawab				Minggu ke-2	Minggu ke-4		Laptop			
				1 orang Pembantu Penanggungjawab				September2022	September2022					
				1 orang Pengendali Teknis										
				1 orang Ketua Tim										
				6 orang Anggota Tim										
				Inspektur Pembantu Wilayah Khusus	5	0	5	02.09	04.09	10 buah				
				1 orang Penanggungjawab				Minggu ke-2	Minggu ke-4					
				1 orang Pembantu Penanggungjawab				September2022	September2022					
				1 orang Pengendali Teknis										

				1 orang Ketua Tim										
				5 orang Anggota Tim										
	Reviu DAK	Reviu	Tahun Anggaran 2022/2023	1 orang Penanggungjawab	18	0	18			17 buah	Kendaraan		sebagian	
				4 orang Pembantu Penanggungjawab							Laptop			
				4 orang Pengendali Teknis										
				4 orang Ketua Tim										
				4 orang Anggota Tim										
	Reviu LKIP Pemda dan Evaluasi SAKIP OPD													
	Reviu LKIP Pemda	Reviu	Tahun 2021	1 orang Penanggungjawab	10	0	10	03.02	02.03	1 buah	Kendaraan	Sudah terealisasi, proses penyusunan laporan		
				1 orang Pembantu Penanggungjawab				Minggu ke-4	Minggu ke-2		Laptop			

				1 orang Pengendali Teknis				Maret 2022	April 2022					
				1 orang Ketua Tim										
				4 orang Anggota Tim										
	Evaluasi SAKIP OPD	Evaluasi	Tahun 2021	Inspektur Pembantu Wilayah I	10	0	10	03.02	02.03	11 buah	Kendaraan	Sudah terealisasi,		
				1 orang Penanggungjawab				Minggu ke-4	Minggu ke-2		Laptop			
				1 orang Pembantu Penanggungjawab				Maret 2022	April 2022					
				1 orang Pengendali Teknis										
				1 orang Ketua Tim										
				6 orang Anggota Tim										
				Inspektur Pembantu Wilayah II	10	0	10	03.02	02.03	9 buah	Kendaraan			
				1 orang Penanggungjawab				Minggu ke-4	Minggu ke-2		Laptop			

				1 orang Pembantu Penanggungjawab				Maret 2022	April 2022				
				1 orang Pengendali Teknis									
				1 orang Ketua Tim									
				7 orang Anggota Tim									
				Inspektur Pembantu Wilayah III	10	0	10	03.02	02.03	11 buah	Kendaraan		
				1 orang Penanggungjawab				Minggu ke-4	Minggu ke-2		Laptop		
				1 orang Pembantu Penanggungjawab				Maret 2022	April 2022				
				1 orang Pengendali Teknis									
				1 orang Ketua Tim									
				4 orang Anggota Tim									
				Inspektur Pembantu Wilayah IV	10	0	10	03.02	02.03	14 buah	Kendaraan		
				1 orang Penanggungjawab				Minggu ke-4	Minggu ke-2		Laptop		
				1 orang Pembantu Penanggungjawab				Maret 2022	April 2022				
				1 orang Pengendali Teknis									

				1 orang Ketua Tim										
				6 orang Anggota Tim										
				Inspektur Pembantu Khusus	10	0	10	03.02	02.03	10 buah	Kendaraan			
				1 orang Penanggungjawab				Minggu ke-4	Minggu ke-2		Laptop			
				1 orang Pembantu Penanggungjawab				Maret 2022	April 2022					
				1 orang Pengendali Teknis										
				1 orang Ketua Tim										
				3 orang Anggota Tim										
D	6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan												
		Reviu dokumen pengelolaan keuangan daerah												
1	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Reviu	Tahun 2021	1 orang Penanggungjawab	17	0	17	02.02	03.03	1 buah	Kendaraan	Sudah terealisasi		
				1 orang Pembantu Penanggungjawab				Minggu ke-2	Minggu ke-3		Laptop			
				1 orang Pengendali Teknis				Pebruari 2022	Maret 2022					

				1 orang Ketua Tim										
				7 orang Anggota Tim										
2	Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa Daerah	Reviu	Tahun Anggaran 2022		12	0	12			3 buah	Kendaraan	Sudah teralisasi		
				1 orang Penanggungjawab							Laptop			
				1 orang Pembantu Penanggungjawab										
				1 orang Pengendali Teknis										
				1 orang Ketua Tim										
				8 orang Anggota Tim										
	Reviu LPPD	Reviu	Tahun 2021	1 orang Penanggungjawab	6	0	6	02.03	04.03	1 buah	Kendaraan	Sudah terealisasi		
				1 orang Pembantu Penanggungjawab				Minggu ke-2	Minggu ke-2		Laptop			
				1 orang Pengendali Teknis				Maret 2022	Maret 2022					
				1 orang Ketua Tim										



				7 orang Anggota Tim											
E	6.01.02.2.01.05 Pengawasan Desa														
	PEMERIKSAAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2021	1 orang Penanggungjawab	20	0	20	02.01	01.02	40 buah LHP Desa	Kendaraan	Sudah terealisasi			
1	Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor			2 orang Pembantu Penanggungjawab				Minggu ke-2	Minggu ke-2		Laptop				
2	Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor			2 orang Pengendali Teknis				Januari 2022	Pebruari 2022						
3	Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor			2 orang Ketua Tim											
4	Desa Kutamandiri Kecamatan Tanjungsari			12 orang Anggota Tim											
5	Desa Gunungmanik Kecamatan Tanjungsari														
6	Desa Sindanggalih Kecamatan Cimanggung														
7	Desa Cimanggung Kecamatan Cimanggung														
8	Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung														

9	Desa Sukadana Kecamatan Cimanggung													
10	Desa Sindangpakuon Kecamatan Cimanggung													
11	Desa Kirisik Kecamatan Jatinunggal													
12	Desa Cimanintin Kecamatan Jatinunggal													
13	Desa Sukapura Kecamatan Wado													
14	Desa Wado Kecamatan Wado													
15	Desa Cieunteung Kecamatan Darmaraja													
16	Desa Darmajaya Kecamatan Darmaraja													
17	Desa Sukamenak Kecamatan Darmaraja													
18	Desa Jayamekar Kecamatan Cibugel													
19	Desa Sukawening Kecamatan Ganeas													
20	Desa Cikondang Kecamatan Ganeas													
21	Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara													
22	Desa Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara													

23	Desa Kebonkalapa Kecamatan Cisarua																		
24	Desa Awilega Kecamatan Tanjungkerta																		
25	Desa Tanjungmekar Kecamatan Tanjungkerta																		
26	Desa Kertamukti Kecamatan Tanjungmedar																		
27	Desa Kamal Kecamatan Tanjungmedar																		
28	Desa Galudra Kecamatan Cimalaka																		
29	Desa Wanajaya Kecamatan Surian																		
30	Desa Tanjung Kecamatan Surian																		
31	Desa Bugel Kecamatan Tomo																		
32	Desa Cipeles Kecamatan Tomo																		
33	Desa Karyamukti Kecamatan Tomo																		
34	Desa Conggeang Kulon Kecamatan Conggeang																		
35	Desa Padaasih Kecamatan Conggeang																		
36	Desa Keboncau Kecamatan Ujungjaya																		

37	Desa Cibuluh Kecamatan Ujungjaya													
38	Desa Padanaan Kecamatan Paseh													
39	Desa Buahdua Kecamatan Buahdua													
40	Desa Mekarmukti Kecamatan Buahdua													
	Sosialisasi dan Pencanangan ZI Desa	Sosialisasi	Tahun 2022	Inspektur Pembantu Wilayah I	8	0	8	02.05	04.05	270 buah	Kendaraan		Sebagian terealisasi	
	Evaluasi SAKIP Desa	Evaluasi	Tahun 2021	1 orang Penanggungjawab				Minggu ke-2	Minggu ke-4		Laptop			
				1 orang Pembantu Penanggungjawab				Mei 2022	Mei 2022					
				1 orang Pengendali Teknis										
				1 orang Ketua Tim										
				7 orang Anggota Tim										
				Inspektur Pembantu Wilayah II	8	0	8	02.05	04.05		Kendaraan			
				1 orang Penanggungjawab				Minggu ke-2	Minggu ke-4		Laptop			

				1 orang Pembantu Penanggungjawab				Mei 2022	Mei 2022					
				1 orang Pengendali Teknis										
				1 orang Ketua Tim										
				8 orang Anggota Tim										
				Inspektur Pembantu Wilayah III	8	0	8	02.05	04.05		Kendaraan			
				1 orang Penanggungjawab				Minggu ke-2	Minggu ke-4		Laptop			
				1 orang Pembantu Penanggungjawab				Mei 2022	Mei 2022					
				1 orang Pengendali Teknis										
				1 orang Ketua Tim										
				6 orang Anggota Tim										
				Inspektur Pembantu Wilayah IV	8	0	8	02.05	04.05		Kendaraan			
				1 orang Penanggungjawab				Minggu ke-2	Minggu ke-4		Laptop			

				1 orang Pembantu Penanggungjawab				Mei 2022	Mei 2022					
				1 orang Pengendali Teknis										
				1 orang Ketua Tim										
				6 orang Anggota Tim										
				Inspektur Pembantu Wilayah Khusus	8	0	8	02.05	04.05					
				1 orang Penanggungjawab				Minggu ke-2	Minggu ke-4					
				1 orang Pembantu Penanggungjawab				Mei 2022	Mei 2022					
				1 orang Pengendali Teknis										
				1 orang Ketua Tim										
				5 orang Anggota Tim										
F	6.01.02.2.01.06 Kerjasama Pengawasan Internal													
	Penyelenggaraan Sapu Bersih Pungutan Liar (SABERPUNGLI)	Saberpungli		Terlaksananya Monitoring dan Sosialisasi Saber Pungli						1 buah	Kendaraan	Sudah teralisasi		

G	6.01.02.2.01.07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP													
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP													
1	Putaran I	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Tahun 2021/2022	1 orang Pembantu Penanggungjawab	6	0	6	01.02	03.02	15 buah	Kendaraan		sebagian telah terealisasi	
				3 orang Ketua Tim				Minggu ke-2	Minggu ke-4		Laptop			
				18 orang Anggota Tim				Pebruari 2022	Pebruari 2022					
2	Putaran II	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Tahun 2021/2022	1 orang Pembantu Penanggungjawab	6	0	6	03.02	01.03	13 buah	Kendaraan			
				3 orang Ketua Tim				Minggu ke-3	Minggu ke-1		Laptop			
				18 orang Anggota Tim				Pebruari 2022	Maret 2022					
3	Putaran III	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Tahun 2021/2022	1 orang Pembantu Penanggungjawab	6	0	6	02.03	04.03	15 buah	Kendaraan			
				3 orang Ketua Tim				Minggu ke-1	Minggu ke-4		Laptop			
				18 orang Anggota Tim				Maret 2022	Maret 2022					

4	Putaran IV	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Tahun 2021/2022	1 orang Pembantu Penanggungjawab	6	0	6	04.03	01.04	15 buah	Kendaraan			
				3 orang Ketua Tim				Minggu ke-4	Minggu ke-1		Laptop			
				18 orang Anggota Tim				Maret 2022	April 2022					
5	Putaran V	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Tahun 2021/2022	1 orang Pembantu Penanggungjawab	6	0	6	01.04	03.04	9 buah	Kendaraan			
				3 orang Ketua Tim				Minggu ke-1	Minggu ke-3		Laptop			
				18 orang Anggota Tim				April 2022	April 2022					
6	Putaran VI	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Tahun 2021/2022	1 orang Pembantu Penanggungjawab	6	0	6	01.05	03.05	9 buah	Kendaraan			
				3 orang Ketua Tim				Minggu ke-1	Minggu ke-3		Laptop			
				18 orang Anggota Tim				Mei 2022	Mei 2022					



7	Putaran VII	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Tahun 2021/2022	1 orang Pembantu Penanggungjawab	6	0	6	01.06	03.06	9 buah	Kendaraan			
				3 orang Ketua Tim				Minggu ke-1	Minggu ke-3		Laptop			
				18 orang Anggota Tim				Juni 2022	Juni 2022					
8	Putaran VIII	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Tahun 2021/2022	1 orang Pembantu Penanggungjawab	6	0	6	01.07	03.07	9 buah	Kendaraan			
				3 orang Ketua Tim				Minggu ke-1	Minggu ke-3		Laptop			
				18 orang Anggota Tim				Juli 2022	Juli 2022					
9	Putaran IX	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Tahun 2021/2022	1 orang Pembantu Penanggungjawab	6	0	6	03.07	01.08	9 buah	Kendaraan			
				3 orang Ketua Tim				Minggu ke-3	Minggu ke-1		Laptop			
				18 orang Anggota Tim				Juli 2022	Agustus 2022					

10	Putaran X	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Tahun 2021/2022	1 orang Pembantu Penanggungjawab	6	0	6	01.08	03.08	9 buah	Kendaraan				
				3 orang Ketua Tim				Minggu ke-1	Minggu ke-3		Laptop				
				18 orang Anggota Tim				Agustus 2022	Agustus 2022						
11	Putaran XI	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Tahun 2021/2022	1 orang Pembantu Penanggungjawab	8	0	8	01.09	03.09	9 buah	Kendaraan				
				3 orang Ketua Tim				Minggu ke-1	Minggu ke-3		Laptop				
				18 orang Anggota Tim				September 2022	September 2022						
	Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil	Monitoring dan Evaluasi		1 orang Ketua						2 buah	Kendaraan	Per semester	Sebagian telah terealisasi		
				1 orang Sekretaris							Laptop				
				7 orang Anggota											

II	6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu													
A	6.01.02.2.02.01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah													
	Penanganan Kasus Pengaduan dan Pemeriksaan TP-TGR	Audit Tujuan Tertentu		1 orang Penanggungjawab	60	60			20 buah	Kendaraan	Waktu menyesuaikan	Sebagian telah terealisasi		
				1 orang Pembantu Penanggungjawab						Laptop				
				1 orang Pengendali Teknis										
				1 orang Ketua Tim										
				2 orang Anggota Tim										
	Penanganan Benturan Kepentingan dan Penanganan Whistle Blower System	Audit Tujuan Tertentu		1 orang Penanggungjawab	7	7	01.08	02.08	5 buah	Kendaraan			belum terealisasi	
				1 orang Pembantu Penanggungjawab			Minggu ke-1	Minggu ke-2		Laptop				
				1 orang Pengendali Teknis			Agustus 2022	Agustus 2022						

				1 orang Ketua Tim										
				5 orang Anggota Tim										
B	6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu												
1	Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (Permintaan Manajemen/Mendesak)			Inspektur Pembantu Wilayah I	10	0	10	03.05	02.06	1 buah	Kendaraan		sebagian telah terealisasi	
	Diantarnya Pengawasan Vaksin COVID-19, Pemeriksaan BTT dan BLT			1 orang Penanggungjawab				Minggu ke-3	Minggu ke-2		Laptop			
				1 orang Pembantu Penanggungjawab				Mei 2022	Juni 2022					
				1 orang Pengendali Teknis										
				1 orang Ketua Tim										
				7 orang Anggota Tim										
				Inspektur Pembantu Wilayah II	10	0	10	03.05	02.06	1 buah	Kendaraan	Sudah terealisasi		
				1 orang Penanggungjawab				Minggu ke-3	Minggu ke-2		Laptop			
				1 orang Pembantu Penanggungjawab				Mei 2022	Juni 2022					
				1 orang Pengendali Teknis										

				1 orang Ketua Tim										
				8 orang Anggota Tim										
				Inspektur Pembantu Wilayah III	10	0	10	03.05	02.06	1 buah	Kendaraan	Sudah teralisasi		
				1 orang Penanggungjawab				Minggu ke-3	Minggu ke-2		Laptop			
				1 orang Pembantu Penanggungjawab				Mei 2022	Juni 2022					
				1 orang Pengendali Teknis										
				1 orang Ketua Tim										
				6 orang Anggota Tim										
				Inspektur Pembantu Wilayah IV	10	0	10	03.05	02.06	1 buah	Kendaraan	Sudah teralisasi		
				1 orang Penanggungjawab				Minggu ke-3	Minggu ke-2		Laptop			
				1 orang Pembantu Penanggungjawab				Mei 2022	Juni 2022					
				1 orang Pengendali Teknis										
				1 orang Ketua Tim										
				6 orang Anggota Tim										

				Inspektur Pembantu Wilayah Khusus	10	0	10	03.05	02.06					
				1 orang Penanggungjawab				Minggu ke-3	Minggu ke-2					
				1 orang Pembantu Penanggungjawab				Mei 2022	Juni 2022					
				1 orang Pengendali Teknis										
				1 orang Ketua Tim										
				5 orang Anggota Tim										
2	Pengawasan Tujuan Tertentu lainnya	Audit Tujuan Tertentu												
	1. reviu atas Kepatuhan Pengelolaan BMD Tahun 2022			1 orang Penanggungjawab	5		5	01.08	02.08	1 buah	Kendaraan			belum terealisasi
				1 orang Pembantu Penanggungjawab				Minggu ke-1	Minggu ke-2		Laptop			
				1 orang Pengendali Teknis				Agustus 2022	Agustus 2022					
				1 orang Ketua Tim										
				4 orang Anggota Tim										
	2. reviu atas Promosi, Rotasi, Mutasi ASN yang dilaksanakan pada Tahun 2022			1 orang Penanggungjawab	5		5	01.08	02.08	1 buah	Kendaraan			belum terealisasi

				1 orang Pembantu Penanggungjawab				Minggu ke-1	Minggu ke-2		Laptop			
				1 orang Pengendali Teknis				Agustus 2022	Agustus 2022					
				1 orang Ketua Tim										
				4 orang Anggota Tim										
	3. reuiu Kinerja UKPBJ Tahun 2022			1 orang Penanggungjawab	5		5	01.08	02.08	1 buah	Kendaraan			belum terealisasi
				1 orang Pembantu Penanggungjawab				Minggu ke-1	Minggu ke-2		Laptop			
				1 orang Pengendali Teknis				Agustus 2022	Agustus 2022					
				1 orang Ketua Tim										
				4 orang Anggota Tim										
	4. reuiu SSH, ASB dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSBK) untuk Standar nilai yang berlaku Tahun 2022			1 orang Penanggungjawab	5		5	01.08	02.08	1 buah	Kendaraan			belum terealisasi
				1 orang Pembantu Penanggungjawab				Minggu ke-1	Minggu ke-2		Laptop			
				1 orang Pengendali Teknis				Agustus 2022	Agustus 2022					
				1 orang Ketua Tim										
				4 orang Anggota Tim										

	5. reuiu Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2022		1 orang Penanggungjawab	5	5	01.08	02.08	1 buah	Kendaraan					belum terealisasi
			1 orang Pembantu Penanggungjawab			Minggu ke-1	Minggu ke-2		Laptop					
			1 orang Pengendali Teknis			Agustus 2022	Agustus 2022							
			1 orang Ketua Tim											
			4 orang Anggota Tim											
	6. Melaksanakan Reviu HPS		1 orang Penanggungjawab	12	12	01.08	02.08	1 buah	Kendaraan					belum terealisasi
			1 orang Pembantu Penanggungjawab			Minggu ke-1	Minggu ke-2		Laptop					
			1 orang Pengendali Teknis			Agustus 2022	Agustus 2022							
			1 orang Ketua Tim											
			8 orang Anggota Tim											
	7. Melaksanakan Tindak Lanjut Monitoring Center for Prevention (MCP) Korsupgah KPK RI		1 orang Penanggungjawab	12	12	02.10	01.11	1 buah	Kendaraan					belum terealisasi
			1 orang Pembantu Penanggungjawab			Minggu ke-2	Minggu ke-1		Laptop					



				1 orang Pengendali Teknis				Oktober 2022	November2022					
				1 orang Ketua Tim										
				8 orang Anggota Tim										
3	Pemeriksaan Dana Pendidikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2021	Audit Tujuan Tertentu	Tahun 2021	1 orang Penanggungjawab	10		10	03.06	01.07	1 buah	Kendaraan		Sebagian teralisasi	
	mengaudit kebijakan BOS Kabupaten sampel sekolah 2 sekolah			1 orang Pembantu Penanggungjawab				Minggu ke-3	Minggu ke-1		Laptop			
				1 orang Pengendali Teknis				Juni 2022	Juli 2022					
				1 orang Ketua Tim										
				10 orang Anggota Tim										
III	6.01.02.3.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan													
A	6.01.02.3.02.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan													

	Terlaksananya bimbingan teknis/pendidikan dan pelatihan sebanyak 25 orang										25 buah sertifikat			belum terealisasi
	Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) 9 kali													
	Peningkatan Kapabilitas APIP (Leveling)										1 dokumen			
	telaah sejawat													
B	6.01.02.3.01.02 perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan													
	penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan											Waktu menyesuaikan		
	1. Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan													belum terealisasi
	2. Rapat Koordinasi Pengawasan													belum terealisasi
	3. tindaklanjut perjanjian kerjasama APIP dan APH													belum terealisasi
IV	6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi													

A	6.01.02.3.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah													
	Pelayanan Konsultasi Pengawas (Serambi Inspektorat Sumedang)													
	Layanan Konsultasi pada SIS		Inspektur Pembantu Wilayah I (12 orang)						16 buah laporan	Laptop		sebagian telah terealisasi		
			Inspektur Pembantu Wilayah II (11 orang)											
			Inspektur Pembantu Wilayah III (12 orang)											
			Inspektur Pembantu Wilayah IV (12 orang)											
	Permintaan Narasumber APIP dari SKPD		1 orang Penanggungjawab											
			1 orang Pembantu Penanggungjawab											
			1 Orang pengendali teknis											
			1 orang Ketua Tim											
			2 orang anggota tim											

	Probit Audit	Probit Audit	Tahun Anggaran 2021	1 orang Penanggungjawab	16	0	16	02.04	02.05	5 buah	Kendaraan			Belum terealisasi
				1 orang Pembantu Penanggungjawab				Minggu ke-2	Minggu ke-2		Laptop			
				1 Orang pengendali teknis				April 2022	Mei 2022					
				1 orang Ketua Tim										
				8 orang anggota tim										
B	6.01.02.3.02.02 Pendampingan dan Asistensi Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi													
	penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan/Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi													
	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Evaluasi	Tahun 2021	Inspektur Pembantu Wilayah I	6	0	6	04.04	02.05	11 buah	Kendaraan		Proses	
				1 orang Penanggungjawab				Minggu ke-4	Minggu ke-2		Laptop			
				1 orang Pembantu Penanggungjawab				April 2022	Mei 2022					
				1 orang Pengendali Teknis										
				1 orang Ketua Tim										

				7 orang Anggota Tim										
				Inspektur Pembantu Wilayah II	6	0	6	04.04	02.05	9 buah	Kendaraan			
				1 orang Penanggungjawab				Minggu ke-4	Minggu ke-2		Laptop			
				1 orang Pembantu Penanggungjawab				April 2022	Mei 2022					
				1 orang Pengendali Teknis										
				1 orang Ketua Tim										
				8 orang Anggota Tim										
				Inspektur Pembantu Wilayah III	6	0	6	04.04	02.05	11 buah	Kendaraan			
				1 orang Penanggungjawab				Minggu ke-4	Minggu ke-2		Laptop			
				1 orang Pembantu Penanggungjawab				April 2022	Mei 2022					
				1 orang Pengendali Teknis										
				1 orang Ketua Tim										

				6 orang Anggota Tim										
				Inspektur Pembantu Wilayah IV	6	0	6	04.04	02.05	14 buah	Kendaraan			
				1 orang Penanggungjawab				Minggu ke-4	Minggu ke-2		Laptop			
				1 orang Pembantu Penanggungjawab				April 2022	Mei 2022					
				1 orang Pengendali Teknis										
				1 orang Ketua Tim										
				6 orang Anggota Tim										
				Inspektur Pembantu Wilayah Khusus	6	0	6	04.04	02.05	10 buah				
				1 orang Penanggungjawab				Minggu ke-4	Minggu ke-2					
				1 orang Pembantu Penanggungjawab				April 2022	Mei 2022					
				1 orang Pengendali Teknis										
				1 orang Ketua Tim										
				5 orang Anggota Tim										

C	6.01.02.3.02.03 Koordinasi dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi													
	Pencegahan Korupsi													
1	Pendampingan dan Monitoring MCP Korsubgah KPK Republik Indonesia (Triwulan)			1 orang Penanggungjawab	20		20			1 buah Laptop			sebagian	
				1 orang Pengendali Teknis										
				1 orang Ketua Tim										
				8 Anggota Tim										
2	Penilaian Internal Zona Integritas												Sudah terealisasi	
	Evaluasi Penilaian Internal Zona Integritas	Evaluasi	Tahun 2021	Inspektur Pembantu Wilayah I	10	0	10	02.04	04.04	11 buah	Kendaraan			
				1 orang Penanggungjawab				Minggu ke-2	Minggu ke-4		Laptop			
				1 orang Pembantu Penanggungjawab				April 2022	April 2022					
				1 orang Pengendali Teknis										
				1 orang Ketua Tim										
				7 orang Anggota Tim										

				Inspektur Pembantu Wilayah II	10	0	10	02.04	04.04	9 buah	Kendaraan			
				1 orang Penanggungjawab				Minggu ke-2	Minggu ke-4		Laptop			
				1 orang Pembantu Penanggungjawab				April 2022	April 2022					
				1 orang Pengendali Teknis										
				1 orang Ketua Tim										
				8 orang Anggota Tim										
				Inspektur Pembantu Wilayah III	10	0	10	02.04	04.04	11 buah	Kendaraan			
				1 orang Penanggungjawab				Minggu ke-2	Minggu ke-4		Laptop			
				1 orang Pembantu Penanggungjawab				April 2022	April 2022					
				1 orang Pengendali Teknis										
				1 orang Ketua Tim										
				6 orang Anggota Tim										



				Inspektur Pembantu Wilayah IV	10	0	10	02.04	04.04	14 buah	Kendaraan			
				1 orang Penanggungjawab				Minggu ke-2	Minggu ke-4		Laptop			
				1 orang Pembantu Penanggungjawab				April 2022	April 2022					
				1 orang Pengendali Teknis										
				1 orang Ketua Tim										
				6 orang Anggota Tim										
				Inspektur Pembantu Wilayah Khusus	10	0	10	02.04	04.04	10 buah				
				1 orang Penanggungjawab				Minggu ke-2	Minggu ke-4					
				1 orang Pembantu Penanggungjawab				April 2022	April 2022					
				1 orang Pengendali Teknis										
				1 orang Ketua Tim										
				5 orang Anggota Tim										

3	Verifikasi LHKPN dan LHKASN			1 orang Penanggungjawab	12	12	02.04	01.05		Laptop	Sudah Teralisasi		
				1 orang Pembantu Penanggungjawab			Minggu ke-2	Minggu ke-1					
				1 orang Pengendali Teknis			April 2022	Mei 2022					
				1 orang Ketua Tim									
				5 orang Anggota Tim									
5	Monitoring Identifikasi Gratifikasi (Triwulan) 2022			1 orang Penanggungjawab	20	20				Laptop		Sebagian	
				1 orang Pembantu Penanggungjawab									
				1 orang Pengendali Teknis									
				1 orang Ketua Tim									
				8 orang Anggota Tim									
6	Monitoring Implementasi ZI Tahun 2022			1 orang Penanggungjawab	12	12				Laptop	Per Triwulan	Sebagian	

				1 orang Pembantu Penanggungjawab										
				1 orang Pengendali Teknis										
				1 orang Ketua Tim										
				10 orang Anggota Tim										
D	6.01.02.3.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas												
		Survey Penilaian Integritas (pendampingan tindak lanjut hasil survey penilaian integritas)											Sebagian	

**RENCANA AKSI KINERJA  
INSPEKTORAT KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN ANGGARAN 2022**

SASARAN				PROGRAM	KEGIATAN				ANGGARAN (Rp)	LANGKAH AKSI	EVALUASI	MONEV	
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PELAKSANAAN				TERCAP AI/ TIDAK	SOLUSI
Optimalnya fungsi Inspektorat Daerah sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang	Persentase tindakan lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan rekomendasi	92%	TW I 25	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase pemenuhan unsur SPIP	Dokumen	TW I	2,540,093,630.00				
			TW II 27					TW II					
			TW III 35					TW III					
			TW IV					TW IV					
	Maturitas SPIP	Level 3+	TW I		Persentase SAKIP Perangkat Daerah yang dievaluasi	Dokumen	TW I						
			TW II				TW II						
			TW III				TW III						
			TW IV				TW IV						

	Persentase Penurunan Temuan penyimpangan terhadap APBD	5%	TW I		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah dokumen laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Dokumen	TW I	617,848,250.00				
			TW II					TW II					
			TW III					TW III					
			TW IV					TW IV					
	Presentase Pemenuhan Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP	67,08%	TW I	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen leveling kapabilitas APIP	Dokumen	TW I	319,281,000.00				
			TW II					TW II					
			TW III					TW III					
			TW IV					TW IV					
	Presentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM	100%	TW I		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah SKPD yang dinilai PMPRB	Dokumen	TW I	772,777,120.00				
			TW II					TW II					
			TW III					TW III					
			TW IV					TW IV					
Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	SAKIP Perangkat Daerah	- Kategori A	TW I						4,250,000,000.00				
			TW II										
			TW III										

Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah	32 Poin	TW IV
		TW I
		TW II
		TW III
		TW IV

**Tabel 2.10 Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja**

Kriteria	Capaian Target Indikator
Memuaskan	$100% < x \leq 125%$
Baik	100%
Cukup	$75% \leq x < 100%$
Kurang	$x < 75%$
Tidak dapat disimpulkan	$x > 125%$

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Kerangka pengukuran capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Sumedang dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut :

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
$76\% \leq 90\%$	Tinggi
$66\% \leq 75\%$	Sedang
$51\% \leq 65\%$	Rendah
$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sedangkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih serta persentase realisasi anggaran lebih rendah dari capaian kinerja. Penghitungannya dengan cara pengurangan persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran.

Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Sumedang Tahun 2022 adalah sebagaimana tercantum dalam table dibawah ini :

**Tabel 3.2**  
**Target Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
Optimalnya fungsi Inspektorat Daerah sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang	Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan rekomendasi	Presen	92%
	Maturitas SPIP	Point	Level 3+
	Persentase Penurunan Temuan penyimpangan terhadap APBD	Persen	5%
	Presentase Pemenuhan Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP	Persen	67,08%
	Presentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM	Persen	100%

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja, 2022

### 3.1 Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran, maka capaian dan analisis kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Sumedang tahun 2021 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, adalah sebagai berikut :

1) Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan rekomendasi

#### a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Target Kinerja “Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan rekomendasi” tahun 2022 adalah 92%. Tindaklanjut hasil pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan rekomendasi pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sumedang sampai dengan semester I telah mencapai 58% dari yang telah di ditargetkan selama satu tahun. Dengan demikian capaian target indikator kinerja tersebut diatas Tercapai dengan kriteria kinerja **Sangat Memuaskan**.



**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja**  
**Persentase Penerapan SPIP pada Organisasi Perangkat Daerah**  
**Tahun 2022 Semester I**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja
Optimalnya fungsi Inspektorat sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan rekomendasi	Persen	92 %	58 %	100 %	Sangat Tinggi

**b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Perbandingan antara tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan rekomendasi tahun 2022 semester I adalah sebesar 58% dari yang telah ditargetkan yaitu 92%, sedangkan tahun 2021 sebesar 82.01%, dari 778 rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti sebanyak 638 rekomendasi.

**Tabel 3.4**  
**Persentase Penerapan SPIP pada Organisasi Perangkat Daerah dengan Tahun Sebelumnya**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022 Semester I			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Optimalnya fungsi Inspektorat sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan rekomendasi	Persen	80%	82%	102%	92%	58%	100%	

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD**

Dalam RPJMD 2018 – 2023, target jangka menengah Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan rekomendasi adalah 90% dan realisasi pada tahun 2022 adalah 92%. Dengan demikian capaian target indikator kinerja tersebut diatas sebesar 100% dengan kategori **Sangat Memuaskan**.

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Realisasi Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan rekomendasi Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah RPJMD**

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RPJMD (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2021	Persentasi Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2022 Semester I
Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan rekomendasi	90%	90%	58%

2) Maturitas SPIP

**a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja**

Target yang ditetapkan pada indikator kinerja Maturitas SPIP adalah level 3+, Saat ini maturitas SPIP dan kapabilitas APIP Kabupaten Sumedang sudah mencapai level 3 atau telah mencapai 95%. Dengan demikian capaian target indikator kinerja tersebut diatas Tercapai dengan kriteria kinerja **Sangat Memuaskan**.

**Tabel 3.6**  
**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja**  
**Maturitas SPIP Tahun 2022 Semester 1**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja
Optimalnya fungsi Inspektorat sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang	Maturitas SPIP	Point	Level 3+	Level 3	95%	Sangat Tinggi

**b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Perbandingan antara Penerapan SPIP pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sumedang tahun 2022 adalah sebesar 95% sedangkan tahun 2021 sebesar 125%. ini disebabkan oleh banyaknya OPD yang menerapkan SPIP sebanyak 55 OPD dari target 44 OPD.

**Tabel 3.7**  
**Persentase Penerapan SPIP pada Organisasi Perangkat Daerah dan Maturitas SPIP**  
**Sampai dengan Tahun 2022 Semester I**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022 Semester I			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Optimalnya fungsi Inspektorat sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang	Persentase Penerapan SPIP pada Organisasi Perangkat Daerah	Perse n	44	55	125%				Sangat Memuaskan
	Maturitas SPIP	Point				Level 3+	Level 3	95%	Sangat Tinggi

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD**

Dalam RPJMD 2018 – 2023, target jangka menengah Persentase Penerapan SPIP adalah 100% dan realisasi pada tahun 2021 adalah 125%, sedangkan pada tahun 2022 indikator kinerja ini berubah menjadi Maturitas SPIP dengan target dapat mencapai level 3+ dan

telah terealisasi menjadi level 3 dengan demikian capaian kinerja jangka menengah Maturitas SPIP mencapai level 3 dengan kategori **Baik**.

**Tabel 3.8**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Persentasi Penerapan SPIP Tahun 2021 dan Maturitas SPIP dengan Target Jangka Menengah RPJMD**

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RPJMD (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2021	Persentasi Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2022 Semester I
Persentase Penerapan SPIP pada Perangkat Daerah	100%	125%	
Maturitas SPIP	Level 3+		Level 3

3) Persentase Penurunan Temuan penyimpangan terhadap APBD

**a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja**

Target yang ditetapkan pada indikator kinerja Persentase Penurunan Temuan penyimpangan terhadap APBD adalah 5%. Realisasi Persentase Penurunan Temuan penyimpangan terhadap APBD adalah 5% sesuai dari yang ditargetkan. Dengan demikian capaian target indikator kinerja tersebut diatas sebesar 100% dengan kategori **Sangat Memuaskan**.

**Tabel 3.9**  
**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Persentase Penurunan Temuan penyimpangan terhadap APBD Tahun 2022 Semester I**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja
Optimalnya fungsi Inspektorat sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang	Persentase Penurunan Temuan penyimpangan terhadap APBD	Persen	5%	5%	100%	Baik

**b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Perbandingan antara indikator kinerja Persentase Penurunan Temuan penyimpangan terhadap APBD tahun 201 adalah 6% sedangkan tahun 2022 adalah 5%. Dengan demikian telah terjadi Persentase Penurunan Temuan penyimpangan terhadap APBD pada Tahun 2022.

**Tabel 3.10**  
**Persentase Penurunan Temuan penyimpangan terhadap APBD dengan Tahun Sebelumnya**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022 Semester I			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Optimalnya fungsi Inspektorat sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang	Persentase Penurunan Temuan penyimpangan terhadap APBD	Persen	6%	6%	100%	5%	5%	100%	

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD**

Dalam RPJMD 2018 – 2023, target jangka menengah Persentase Penurunan Temuan penyimpangan terhadap APBD adalah 5% dan realisasi pada tahun 2021 adalah 5%. Dengan demikian capaian target indikator kinerja tersebut diatas sebesar 100% dengan kategori **Baik**.

**Tabel 3.11**

**Perbandingan Realisasi Persentase Penurunan Temuan penyimpangan terhadap APBD Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah RPJMD**

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RPJMD (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2022 Semester I	Persentasi Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2022 Semester I
Persentase Penurunan Temuan penyimpangan terhadap APBD	6%	6%	100%

**4) Presentase Pemenuhan Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP**

**a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja**

Target yang ditetapkan pada indikator kinerja Presentase Pemenuhan Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP pada tahun 2022 adalah 67,08%, Sampai dengan semester I Kegiatan tersebut telah dilaksanakan monitoring dan persiapan pelaksanaan kegiatan sehingga dapat terealisasi sebesar 17,08% dari yang telah ditargetkan. Dengan demikian capaian target indikator kinerja tersebut diatas belum tercapai dan akan segera dilaksanakan pada semester II Tahun 2022

**Tabel ..**

**Presentase Pemenuhan Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja
Optimalnya fungsi Inspektorat sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang	Presentase Pemenuhan Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP	Persen	67,08%	17,08%	30%	

**b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Perbandingan antara Tingkat Kapabilitas APIP / Internal Audit Capability Model (IACM) tahun 2021 adalah Level 3 dengan target Level 3. Pada Tahun 2022 indikator kinerja tersebut berubah menjadi Presentase Pemenuhan Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP dengan target 67,08% dan sampai dengan semester I sudah terealisasi sebesar 17,08% Dengan demikian capaian target indikator kinerja tersebut diatas belum tercapai dan akan segera dilaksanakan pada semester II Tahun 2022.

**Tabel ..**  
**Presentase Pemenuhan Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP**  
**dengan Tahun Sebelumnya Tingkat Kapabilitas APIP / Internal Audit Capability Model**  
**(IACM)**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022 Semester I			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realsiasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Optimalnya fungsi Inspektorat sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang	Tingkat Kapabilitas APIP / Internal Audit Capability Model (IACM)		Level 3	Level 3	Level 3				
	Presentase Pemenuhan Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP					67,08%	17,08%	30%	Dilaksanakan Semester II

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD**

Dalam RPJMD 2018 – 2023, target jangka menengah Tingkat Kapabilitas APIP / Internal Audit Capability Model (IACM) adalah Level 3 dan realisasi pada tahun 2021 masih di level 3. Pada tahun 2022 indikator kinerja tersebut berubah menjadi Presentase Pemenuhan Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP dengan target 67,08% dan sampai dengan semester I sudah terealisasi sebesar 17,08% Dengan demikian capaian target indikator kinerja tersebut diatas belum tercapai dan akan segera dilaksanakan pada semester II Tahun 2022..

**Tabel ..**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Pemenuhan Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP dengan Target Jangka Menengah RPJMD**

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RPJMD (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2022 Semester II	Persentasi Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2021 Semester II
Pemenuhan Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP	67,08%	17,08%	30%

5) Presentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM

**a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja**

Target yang ditetapkan pada indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM pada tahun 2022 adalah 100% atau 55 OPD. Hasil evaluasi perangkat daerah yang melaksanakan pembangunan zona integritas adalah 100% atau 55 OPD sesuai dari yang ditargetkan.

Dengan demikian capaian target indikator kinerja tersebut diatas sebesar 100% dengan kategori **Baik**..

**Tabel ..**

**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja**

**Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM Tahun 2022 Semester I**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja
Optimalnya fungsi Inspektorat sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM	Persen	100% atau 55 OPD	100% atau 55 OPD	100%	Baik

**b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Perbandingan antara Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM tahun 2021 adalah sebesar 100% sedangkan tahun 2022 sebesar 100%. Adanya Peningkatan Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM yang pada tahun 2020 sebanyak 23 OPD tahun 2022 menjadi 55 OPD.

**Tabel ..**

**Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM dengan Tahun Sebelumnya**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022 Semester II			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Optimalnya fungsi Inspektorat sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM	Persen	40% atau 22 OPD	40% atau 22 OPD	100%	100% atau 55 OPD	100% atau 55 OPD	100%	

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD**

Dalam RPJMD 2018 – 2023, target jangka menengah Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM adalah 100% dan realisasi pada tahun 2021 adalah 100%. Dengan demikian capaian target indikator kinerja tersebut diatas sebesar 100% dengan kategori **Baik**..

**Tabel ..**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah RPJMD**

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RPJMD (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2022	Persentasi Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2022
Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM	100 % dari 55 OPD	100% dari 55 OPD	100% dari 55 OPD

### 3.1.2 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

PKPT Inspektorat Tahun 2022 menggambarkan kegiatan mandatory yang tercantum dalam kebijakan pengawasan yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri, dimana kegiatan-kegiatan tersebut menjadi target kinerja Auditor dan P2UPD selaras dengan Indikator Kinerja Utama Inspektorat, namun dalam pelaksanaannya masih bergantung kepada ketersediaan anggaran yang sangat terbatas, sehingga dalam perencanaan kegiatan perlu diterapkan manajemen risiko.

Dalam upaya menangani keterbatasan anggaran, maka perlu dilakukan efisiensi anggaran, termasuk dalam bidang pengawasan. Efisiensi anggaran dapat dilakukan melalui pergeseran sub kegiatan pendukung yang melebihi kebutuhan dan bisa dilakukan rasionalisasi.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2022 Semester I, Inspektorat telah berhasil memenuhi target kinerja sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2022, dengan pencapaian prestasi:

- Pencapaian Kapabilitas APIP/IACM level 3
- Pencapaian Maturitas SPIP level 3

Inspektorat Kabupaten Sumedang pada tahun 2022 melaksanakan 2 program urusan, 4 kegiatan urusan dan 15 Sub Kegiatan dengan 6 indikator kinerja sasaran, 8 indikator kinerja program dan 17 kinerja kegiatan dengan jumlah pagu urusan sebesar Rp 1,736,248,600 dari total belanja langsung sebesar Rp. 4,250,000,000 (40,85%) dari total belanja APBD Kabupaten Sumedang).

Jika melihat besaran pagu belanja langsung sebesar 0,21% dari total belanja langsung seluruh SKPD pada tahun 2020 sebesar Rp. 2,943,323,027,759.00, maka sebanding dengan kinerja yang telah dicapai dan bahkan melebihi target kinerja jika dihitung nilai tambah yang dicapai, dan ini sekaligus menggambarkan efektifitas dan efisiensi anggaran tahun 2020

telah dilakukan Inspektorat dengan salah satu strateginya adalah penerapan manajemen risiko.

### 3.1.3 Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan

PKPT Inspektorat Tahun 2021 menggambarkan kegiatan mandatory yang tercantum dalam kebijakan pengawasan yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri, dimana kegiatan-kegiatan tersebut menjadi target kinerja Auditor dan P2UPD selaras dengan Indikator Kinerja Utama Inspektorat, namun dalam pelaksanaannya masih bergantung kepada ketersediaan anggaran yang sangat terbatas, sehingga dalam perencanaan kegiatan perilaku diterapkan manajemen risiko.

Dalam upaya menangani keterbatasan anggaran, maka perlu dilakukan efisiensi anggaran, termasuk dalam bidang pengawasan. Efisiensi anggaran dapat dilakukan melalui pergeseran sub kegiatan pendukung yang melebihi kebutuhan dan bisa dilakukan rasionalisasi. Adapun Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.5. Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan**

Program / Kegiatan	Anggaran	Target		Realisasi		Output Kegiatan Yang Telah Selesai Dilaksanakan	
		Rp	Keuangan	Fisik	Keuangan		
			Rp	%	Rp		%
2	3	5	7	8	9	13	
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>3,157,941,880</b>	<b>3,157,941,880</b>	100%	<b>1,312,774,150</b>	41.57%	-Persentase pemenuhan unsur SPIP -Persentase SAKIP Perangkat Daerah yang dievaluasi	
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	567,101,450	567,101,450	100%	248,031,400	43.74%	-Persentase pemenuhan unsur SPIP	
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	333,200,500	333,200,500	100%	27,700,000	8.31%	-Persentase pemenuhan unsur SPIP	
Reviu Laporan Kinerja	577,126,050	577,126,050	100%	282,547,750	48.96%	-Persentase pemenuhan unsur SPIP	
Reviu Laporan Keuangan	140,701,250	140,701,250	100%	88,440,000	62.86%	-Persentase pemenuhan unsur SPIP	
Pengawasan Desa	290,029,210	290,029,210	100%	175,000,000	60.34%	-Persentase pemenuhan unsur SPIP	
Kerjasama Pengawasan Internal	95,000,000	95,000,000	100%		0.00%	-Persentase pemenuhan unsur SPIP	



Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	536,935,170	536,935,170	100%	273,425,000	50.92%	-Persentase pemenuhan unsur SPIP
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	220,810,000	220,810,000	100%	77,805,000	35.24%	-Persentase SAKIP Perangkat Daerah yang dievaluasi
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	397,038,250	397,038,250	100%	139,825,000	35.22%	-Persentase SAKIP Perangkat Daerah yang dievaluasi
<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>1,092,058,120</b>	<b>1,092,058,120</b>	<b>100%</b>	<b>423,474,450</b>	<b>38.78%</b>	<b>- Cakupan Zona Integritas - Presentase pemenuhan elemen IACM</b>
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	230,199,000	230,199,000	100%	39,308,450	17.08%	- Jumlah dokumen leveling kapabilitas APIP
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	89,082,000	89,082,000	100%		0.00%	- Jumlah dokumen leveling kapabilitas APIP
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	142,140,120	142,140,120	100%	31,800,000	22.37%	- Jumlah SKPD yang dinilai PMPRB
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	115,596,750	115,596,750	100%	98,160,000	84.92%	- Jumlah SKPD yang dinilai PMPRB
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	474,386,000	474,386,000	100%	229,106,000	48.30%	- Jumlah SKPD yang dinilai PMPRB
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	40,654,250	40,654,250	100%	25,100,000	61.74%	- Jumlah SKPD yang dinilai PMPRB
<b>JUMLAH</b>	<b>4,250,000,000</b>	<b>4,250,000,000</b>		<b>1,736,248,600</b>	<b>40.85%</b>	

### 3.2. Realisasi Anggaran Semester 1 Tahun 2022

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2022 sampai dengan semester 1 dalam menunjang indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 40,85 % dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.6 Realisasi Penyerapan Anggaran Kegiatan Semester 1 Tahun 2022**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	JUMLAH BELANJA	SISA PAGU	PRESENTASE
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>13,531,567,410</b>	<b>6,737,065,341</b>	<b>6,794,502,069</b>	<b>49.79%</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12,500,000.00	10,250,000.00	2,250,000.00	82.00%

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8,000,000.00	-	8,000,000.00	0.00%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8,000,000.00	-	8,000,000.00	0.00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	43,120,000.00	20,730,000.00	22,390,000.00	48.08%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11,904,567,410.00	6,048,058,798.00	5,856,508,612.00	50.80%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24,000,000.00	12,300,000.00	11,700,000.00	51.25%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15,500,000.00	8,840,000.00	6,660,000.00	57.03%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	26,880,000.00	9,460,000.00	17,420,000.00	35.19%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40,000,000.00	-	40,000,000.00	0.00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	208,992,600.00	119,085,800.00	89,906,800.00	56.98%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	91,061,750.00	58,517,200.00	32,544,550.00	64.26%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10,440,000.00	4,500,000.00	5,940,000.00	43.10%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	176,869,000.00	130,305,815.00	46,563,185.00	73.67%
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	150,000,000.00	-	150,000,000.00	0.00%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21,206,650.00	9,367,500.00	11,839,150.00	44.17%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72,000,000.00	12,897,702.00	59,102,298.00	17.91%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	370,000,000.00	175,720,000.00	194,280,000.00	47.49%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	267,600,000.00	110,282,526.00	157,317,474.00	41.21%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	53,830,000.00	-	53,830,000.00	0.00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27,000,000.00	6,750,000.00	20,250,000.00	25.00%

<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>3,157,941,880.00</b>	<b>1,312,774,150.00</b>	<b>1,845,167,730.00</b>	<b>41.57%</b>
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	567,101,450.00	248,031,400.00	319,070,050.00	43.74%
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	333,200,500.00	27,700,000.00	305,500,500.00	8.31%
Reviu Laporan Kinerja	577,126,050.00	282,547,750.00	294,578,300.00	48.96%
Reviu Laporan Keuangan	140,701,250.00	88,440,000.00	52,261,250.00	62.86%
Pengawasan Desa	290,029,210.00	175,000,000.00	115,029,210.00	60.34%
Kerjasama Pengawasan Internal	95,000,000.00	-	95,000,000.00	0.00%
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	536,935,170.00	273,425,000.00	263,510,170.00	50.92%
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	220,810,000.00	77,805,000.00	143,005,000.00	35.24%
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	397,038,250.00	139,825,000.00	257,213,250.00	35.22%
<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>1,092,058,120.00</b>	<b>423,474,450.00</b>	<b>668,583,670.00</b>	<b>38.78%</b>
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	230,199,000.00	39,308,450.00	190,890,550.00	17.08%
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	89,082,000.00	-	89,082,000.00	0.00%
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	142,140,120.00	31,800,000.00	110,340,120.00	22.37%
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	115,596,750.00	98,160,000.00	17,436,750.00	84.92%
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	474,386,000.00	229,106,000.00	245,280,000.00	48.30%
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	40,654,250.00	25,100,000.00	15,554,250.00	61.74%
<b>JUMLAH</b>	<b>17,781,567,410.00</b>	<b>8,473,313,941.00</b>	<b>9,308,253,469.00</b>	<b>47.65%</b>

Sedangkan pada tahun sebelumnya realisasi anggaran sebesar 99,61 % dengan rincian sebagaimana tercantum pada table dibawah ini :

Tabel ...

## Realisasi Penyerapan Anggaran Kegiatan Tahun 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	JUMLAH BELANJA	PRESENTASE
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7,825,000	7,825,000	100.00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4,000,000	4,000,000	100.00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4,000,000	4,000,000	100.00%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4,000,000	4,000,000	100.00%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4,000,000	4,000,000	100.00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31,575,000	31,575,000	100.00%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10,479,181,755	10,449,660,332	99.72%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	26,350,000	26,350,000	100.00%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	21,000,000	21,000,000	100.00%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20,280,000	20,280,000	100.00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	287,850,000	287,383,000	99.84%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	241,025,700	241,025,700	100.00%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	102,579,700	100,849,700	98.31%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9,046,600	9,000,000	99.48%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	132,243,000	132,243,000	100.00%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21,976,000	21,975,200	100.00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27,000,000	24,739,501	91.63%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	395,190,000	394,847,000	99.91%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	236,000,000	236,000,000	100.00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27,000,000	27,000,000	100.00%
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	392,542,500	387,276,479	98.66%
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	399,210,500	399,210,500	100.00%
Reviu Laporan Kinerja	541,595,000	541,595,000	100.00%
Reviu Laporan Keuangan	130,725,000	130,500,000	99.83%
Pengawasan Desa	357,026,000	357,026,000	100.00%
Kerjasama Pengawasan Internal	200,000,000	198,770,000	99.39%

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	634,473,000	634,473,000	100.00%
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	156,206,500	156,206,500	100.00%
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	485,115,000	485,115,000	100.00%
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	257,593,750	245,518,750	95.31%
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	66,800,000	64,260,000	96.20%
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	181,230,550	180,170,550	99.42%
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	115,835,000	115,835,000	100.00%
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	308,505,000	308,480,000	99.99%
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	41,650,000	34,180,000	82.06%
JUMLAH	16,350,630,555	16,286,370,212	99.61%

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Dalam rangka mewujudkan kualitas penyelenggaraan pengawasan yang meliputi aspek kebijakan, kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah dan aset daerah (sesuai dengan visi dan misinya), Inspektorat perlu senantiasa lebih produktif dan profesional dalam peningkatan pengawasan untuk mewujudkan good governance.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja pada berbagai sasaran strategis dan indikator kinerja utama Inspektorat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Inspektorat dalam melaksanakan berbagai kewajiban yang diembannya untuk berkontribusi dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan.

Sebagai sebuah gambaran kinerja, LKIP diharapkan dapat menyajikan keseluruhan profil pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Sumedang secara utuh. Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa keterbatasan yang ada menjadikan LKIP Inspektorat Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Semester I ini belum sempurna. Oleh karena itu, perbaikan-perbaikan segera dilakukan utamanya menyangkut perbaikan terhadap indikator-indikator kinerja dan pengumpulan data yang lebih sistematis dan terstruktur.

### 4.2 Perbaikan ke Depan

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan yang berkualitas dan mengacu pada target outcome, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Inspektorat Kabupaten Sumedang berkewajiban untuk mengevaluasi secara mandiri pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam PKPT 2022 dengan efektif dan efisien;
2. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integritas, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat Kabupaten Sumedang wajib melakukan perbaikan untuk pelaksanaan PKPT Tahun 2023;

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Sumedang Tahun 2022, sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Sumedang 2022.

Sumedang, 28 Juli 2022

Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang,



**NASAM, SE., Ak**

Pembina Utama Muda/ IV c

NIP. 19640707 198703 1005

Rancangan Akhir RKPD 2022								Analisis Kebutuhan tahun 2022						
Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Satuan	Anggaran	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Satuan	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>INSPEKTORAT</b>														
<b>URUSAN</b>							<b>5,139,757,000.00</b>							<b>6,740,000,000.00</b>
<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>							<b>3,301,500,000.00</b>							<b>4,285,000,000.00</b>
							<b>2,485,000,000.00</b>							<b>3,160,000,000.00</b>
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		55 SKPD	Jumlah laporan hasil monev SPIP	55	LHP	85,000,000.00	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		55 SKPD	Jumlah laporan hasil monev SPIP	55	LHP	120,000,000.00
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	29 SKPD	Jumlah Laporan Hasil Monev MR	29	LHP	100,000,000.00		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	29 SKPD	Jumlah Laporan Hasil Monev MR	29	LHP	120,000,000.00
			55 SKPD	Jumlah Laporan hasil evaluasi SAKIP PD	55	LHE	100,000,000.00			55 SKPD	Jumlah Laporan hasil evaluasi SAKIP PD	55	LHE	100,000,000.00

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	12 SKPD	Jumlah laporan hasil pemeriksaan kinerja OPD	12	LHP	100,000,000.00
	6 SKPD	Jumlah laporan hasil evaluasi PPRG	1	LHE	50,000,000.00
	4 SKPD	Jumlah laporan hasil Evaluasi Pelayanan Publik	4	LHE	50,000,000.00
	156 Dinas/Instansi	Jumlah laporan tindak lanjut dan inventarisasi temuan hasil pengawasan	156	Laporan	500,000,000.00
	SKPD	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi TLHP BPK	2	Laporan	85,000,000.00

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	12 SKPD	Jumlah laporan hasil pemeriksaan kinerja OPD	12	LHP	150,000,000.00
	6 SKPD	Jumlah laporan hasil evaluasi PPRG	1	LHE	85,000,000.00
	4 SKPD	Jumlah laporan hasil Evaluasi Pelayanan Publik	4	LHE	85,000,000.00
	156 Dinas/Instansi	Jumlah laporan tindak lanjut dan inventarisasi temuan hasil pengawasan	156	Laporan	650,000,000.00
	SKPD	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi TLHP BPK	2	Laporan	85,000,000.00



		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	32 SKPD	Jumlah laporan hasil pemeriksaan keuangan OPD	32	LHP	150,000,000.00
		Reviu Laporan Kinerja	Bap ped a	Jumlah laporan hasil reviu perencanaan pembangunan (RPJMD, RKPD)	2	LHR	50,000,000.00
			55 SKPD	Jumlah laporan hasil reviu perencanaan SKPD (Renstra, Renja, KUA PPAS, RKA, DPA)	4	LHR	50,000,000.00
			SKPD penerima DAK	Jumlah dokumen laporan hasil reviu DAK	2	LHR	50,000,000.00

		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	32 SKPD	Jumlah laporan hasil pemeriksaan keuangan OPD	32	LHP	200,000,000.00
		Reviu Laporan Kinerja	Bappe da	Jumlah laporan hasil reviu perencanaan pembangunan (RPJMD, RKPD)	2	LHR	85,000,000.00
			55 SKPD	Jumlah laporan hasil reviu perencanaan SKPD (Renstra, Renja, KUA PPAS, RKA, DPA)	4	LHR	85,000,000.00
			SKPD penerima DAK	Jumlah dokumen laporan hasil reviu DAK	2	LHR	85,000,000.00

			Bagian Organisasi	Jumlah laporan hasil revidu IKIP Pemda	1	LHR	50,000,000.00
		Revidu Laporan Keuangan	Bagian Tape m	Jumlah laporan hasil revidu LKPD,	1	LHR	85,000,000.00
			SKPD	jumlah laporan hasil revidu penyerapan angggaran SKPD	55	LHR	85,000,000.00

			Bagian Organisasi	Jumlah laporan hasil revidu IKIP Pemda	1	LHR	85,000,000.00
		Revidu Laporan Keuangan	Bagian Tape m	Jumlah laporan hasil revidu LKPD,	1	LHR	85,000,000.00
			SKPD	jumlah laporan hasil revidu penyerapan angggaran SKPD	55	LHR	85,000,000.00

		UKP BJ	jumlah laporan hasil reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa SKPD	1	LHR	85,000,000.00
Pengawasan Desa	SKP D	Jumlah laporan hasil pemeriksaan Desa	270	LHP	730,000,000.00	
	Des a	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi dana desa	270	LHM	-	

		UKPB J	jumlah laporan hasil reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa SKPD	1	LHR	85,000,000.00
Pengawasan Desa	SKPD	Jumlah laporan hasil pemeriksaan Desa	270	LHP	850,000,000.00	
	Desa	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi dana desa	270	LHM	-	

		Kerjasama Pengawasan Internal	SKPD	Jumlah dokumen sosialisasi dan aksi saberpungli	1	Dokumen	80,000,000.00		Kerjasama Pengawasan Internal	SKPD	Jumlah dokumen sosialisasi dan aksi saberpungli	1	Dokumen	120,000,000.00
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						<b>816,500,000.00</b>		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu					<b>1,125,000,000.00</b>
			SKPD/Instansi	Jumlah laporan hasil pengawasan penanganan kasus pengaduan	20	LHP	150,000,000.00			SKPD/Instansi	Jumlah laporan hasil pengawasan penanganan kasus pengaduan	20	LHP	250,000,000.00
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	SKPD	jumlah dokumen pemeriksaan dan penyelesaian TPTGR	1	Dokumen	50,000,000.00		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	SKPD	jumlah dokumen pemeriksaan dan penyelesaian TPTGR	1	Dokumen	50,000,000.00

			SKPD	jumlah dokumen pengendalian TPTGR di lingkungan Pemda	1	Dokumen	50,000,000.00			SKPD	jumlah dokumen pengendalian TPTGR di lingkungan Pemda	1	Dokumen	50,000,000.00
			SKPD	Jumlah dokumen penanganan benturan kepentingan	1	Dokumen	51,000,000.00			SKPD	Jumlah dokumen penanganan benturan kepentingan	1	Dokumen	100,000,000.00
			SKPD	Jumlah dokumen penanganan Whistle Blowing Sistem	1	Dokumen	50,000,000.00			SKPD	Jumlah dokumen penanganan Whistle Blowing Sistem	1	Dokumen	120,000,000.00



Fasilitasi Pengawasan		Insp ektor at	Jumlah dokumen leveling peningkatan kapasitas APIP	1	Doku men	120,257,000.00	dan Fasilitasi Pengawasan		Inspek torat	Jumlah dokumen leveling peningkatan kapasitas APIP	1	Dokum en	150,000,000.00
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Insp ektor at	Jumlah dokumen kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	1	Doku men	22,000,000.00		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Inspek torat	Jumlah dokumen kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	1	Dokum en	85,000,000.00
		Insp ektor at	Jumlah dokumen penilaian angka kredit	1	Doku men	40,000,000.00			Inspek torat	Jumlah dokumen penilaian angka kredit	1	Dokum en	85,000,000.00

		Insp ektor at	Jumlah dokumen koordinasi pengawasan/g elar pengawasan	1	Doku men	21,000,000.00			Inspek torat	Jumlah dokumen koordinasi pengawasan/gel ar pengawasan	1	Dokum en	85,000,000.00
Pendampingan dan Asistensi						<b>1,085,000,000.00</b>	Pendampingan dan Asistensi						<b>1,400,000,000.00</b>
	Pendampingan , Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	SKP D	Jumlah SKPD yang dinilai PMPRB	55	Lapor an	85,000,000.00		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	SKPD	Jumlah SKPD yang dinilai PMPRB	55	Lapora n	120,000,000.00
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan	SKP D	Jumlah dokumen laporan gratifikasi	1	Doku men	85,000,000.00		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	SKPD	Jumlah dokumen laporan gratifikasi	1	Dokum en	85,000,000.00



	Pemberantasan Korupsi	SKPD	Jumlah dokumen MCP Korsupgah	1	Dokumen	100,000,000.00			SKPD	Jumlah dokumen MCP Korsupgah	1	Dokumen	120,000,000.00
		SKPD	Jumlah dokumen verifikasi pelaporan Stranas PK	1	Dokumen	50,000,000.00			SKPD	Jumlah dokumen verifikasi pelaporan Stranas PK	1	Dokumen	85,000,000.00
		ASN Pemda Sumedang	Jumlah dokumen pelaporan LHKPN dan LHKASN	1	Dokumen	85,000,000.00			ASN Pemda Sumedang	Jumlah dokumen pelaporan LHKPN dan LHKASN	1	Dokumen	120,000,000.00

	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	55 SKPD	Jumlah OPD yang dilakukan Pembinaan, Pemantauan dan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas	55	Laporan	150,000,000.00		55 SKPD	Jumlah OPD yang dilakukan Pembinaan, Pemantauan dan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas	55	Laporan	250,000,000.00
		Pemda	Jumlah Dokumen Survey Penilaian Integritas (SPI)	1	Dokumen	150,000,000.00						

Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	SKPD dan Desa	Jumlah desa dan SKPD yang berkonsultasi	50	Laporan	80,000,000.00	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	SKPD dan Desa	Jumlah desa dan SKPD yang berkonsultasi	50	Laporan	120,000,000.00
	SKPD	Jumlah kegiatan yang dilakukan Probit Audit	5	LHP	200,000,000.00		SKPD	Jumlah kegiatan yang dilakukan Probit Audit	5	LHP	200,000,000.00
	SKPD dan Desa	Jumlah OPD dan Desa	55 OPD, 26 desa	Laporan	100,000,000.00		SKPD dan Desa	Jumlah OPD dan Desa	55 OPD, 26 desa	Laporan	150,000,000.00

**KONSISTENSI TARGET PROGRAM**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022 DAN RPJMD TAHUN PELAKSANAAN (TAHUN 2022)**

**KABUPATEN : SUMEDANG**

<b>NO</b>	<b>URUSAN</b>	<b>KINERJA PROGRAM RPJMD</b>	<b>TARGET DAN SATUAN</b>	<b>PROGRAM RKPd</b>	<b>KINERJA PROGRAM RKPd</b>	<b>TARGET DAN SATUAN</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>	<i>(9)</i>
1.	Inspektorat	Persentase pemenuhan unsur SPIP	100%	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase pemenuhan unsur SPIP	100%	-	Inspektorat
		Persentase MR Perangkat Daerah yang dievaluasi	53%		Persentase MR Perangkat Daerah yang dievaluasi	53%	-	Inspektorat
		Persentase SAKIP Perangkat Daerah yang dievaluasi	100%		Persentase SAKIP Perangkat Daerah yang dievaluasi	100%	-	Inspektorat
		Jumlah temuan hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti berdasarkan aspek pemeriksaan	353 temuan		Jumlah temuan hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti berdasarkan aspek pemeriksaan	353 temuan	-	Inspektorat
		Jumlah temuan hasil pengawasan berdasarkan aspek pemeriksaan	425 temuan		Jumlah temuan hasil pengawasan berdasarkan aspek pemeriksaan	425 temuan	-	Inspektorat
		Jumlah Perangkat daerah dan Pemerintah desa yang diberi konsultasi	55 PD dan 26 Desa		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat daerah dan Pemerintah desa yang diberi konsultasi	55 PD dan 26 Desa	-
		Persentase elemen IACM yang terpenuhi	100%	Persentase elemen IACM yang terpenuhi		100%	-	Inspektorat
		Persentase Penilaian Zona Integritas	100%	Persentase Penilaian Zona Integritas		100%	-	Inspektorat